

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



**DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA MAKASSAR**

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

KATA PENGANTAR

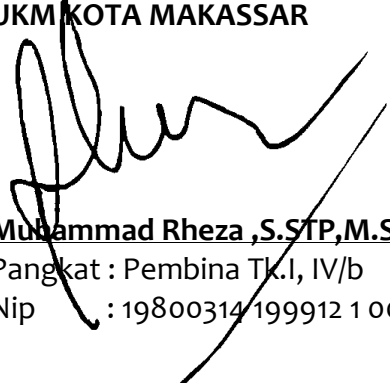
Puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2023 telah selesai dilaksanakan. LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 dan sebagai wujud pertanggungjawaban Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaian Tujuan melalui Kebijakan, Program dan Kegiatan.

LKjIP ini menguraikan keberhasilan dan kegagalan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). LKjIP ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2023 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LKjIP ini dimasa mendatang. LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Makassar , 26 Januari 2024
**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM KOTA MAKASSAR**



Muhammad Rheza ,S.STP,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
Nip : 19800314/199912 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
C. Isu Strategis	11
D. Landasan Hukum.....	13
E. Sistematika.....	14
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis.....	15
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	22
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	26
3.2. Realisasi Anggaran.....	73
3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	78

BAB IV : PENUTUP	89
4.1. Kesimpulan	89
4.2. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan mendatang	90

LAMPIRAN :

LAMPIRAN 1.1 PETA JABATAN PELAKSANA

LAMPIRAN 2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

LAMPIRAN 2.1.1 PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

LAMPIRAN 3.1.1 LAPORAN KERAGAAN KOPERASI

LAMPIRAN 3.1.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

LAMPIRAN 3.1.3 LAPORAN REALISASI

LAMPIRAN KERAGAAN KSP

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH

MATRIKS RENSTRA

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar salah satu OPD dilingkungan pemerintah Kota Makassar memiliki peran dalam mensukseskan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta turut mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Makassar yang salah satunya berorientasi kepada meningkatnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro guna untuk mewujudkan wadah pemberi informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan untuk kepentingan berbagai pihak terkait.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian dan UMKM adalah menyediakan dukungan untuk Koperasi dan UMKM dalam hal ini secara struktural dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Pertumbuhan ekonomi terkoreksi amat tajam dan berujung agar tidak masuk kejurang resesi. Kondisi ini membutuhkan respons Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Makassar cepat dan tepat disektor ekonomi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Makassar merupakan perangkat daerah yang memiliki posisi yang strategis untuk mensukseskan program-program pemerintah karena berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat Kota Makassar.

Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memuat dukungan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip. Koperasi telah menjelaskan bahwa koperasi berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 serta nilai dan prinsip.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang memperkuat pemerintahan yang baik melalui tahapan proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi, dan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja, Pengukuran, dan pengumpulan data kinerja, analisis, Review dan Pelaporan kinerja, serta penggunaan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan dibidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, Usaha kecil dan Menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan Peraturan Daerah ini maka kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2021 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pendidikan, Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Adapun fungsi masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

1. **Sekretariat** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 1. perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 2. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 3. pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 4. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

- 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas, Subbagian Perencanaan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :
- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - d. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
 - e. menghimpun bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - g. menghimpun, memaduserasikan dan menyiapkan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dari setiap bidang untuk dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait;
 - h. menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada

atasan;

- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan. Dalam melaksanakan rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Keuangan;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Keuangan;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. meneliti dan memverifikasi kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan dokumen pencairan anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup dinas;
- g. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian. Dalam

melaksanakan tugas, Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup dinas;
- f. meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari setiap bidang;
- g. membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan barang unit;
- h. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang;
- i. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di lingkup dinas;
- j. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris Daerah;
- k. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler dinas;
- l. menghimpun bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- q. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

5. **Bidang Kelembagaan Koperasi** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan, manajemen dan usaha koperasi. Dalam melaksanakan tugas,

Bidang Kelembagaan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan koperasi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan koperasi;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan koperasi;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan koperasi;
- e. pelaksanaan administrasi di bidang kelembagaan koperasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

6. Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dibidang industri pertanian, industri non-pertanian, perdagangan aneka usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan administrasi di bidang usaha kecil dan menengah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam yang mempunyai tugas melaksanakan menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan perencanaan fasilitasi permodalan, pengawasan dan penilaian koperasi Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan simpan pinjam;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan simpan pinjam;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembiayaan dan simpan pinjam;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan dan simpan pinjam;
- e. pelaksanaan administrasi di bidang pembiayaan dan simpan pinjam; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

8. Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan koperasi dan usaha kecil menengah. Dalam melaksanakan tugas, bidang

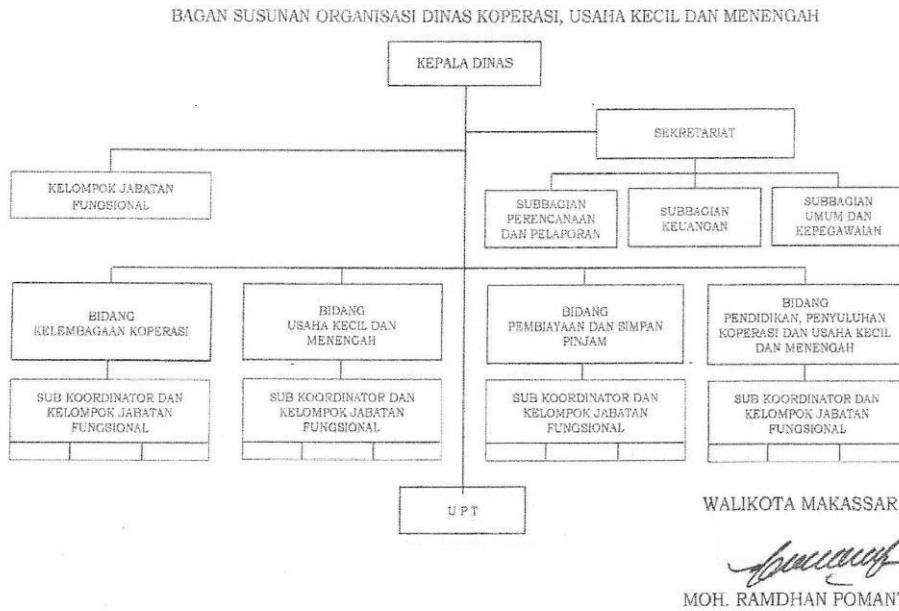
pendidikan dan penyuluhan koperasi dan usaha kecil menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, penyuluhan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan, penyuluhan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan, penyuluhan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, penyuluhan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan, penyuluhan koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi UKM Kota Makassar sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH



Secara lengkap Bagan Struktur Jabatan Pelaksana Dinas Koperasi UKM Kota Makassar sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

Adapun lebih jelasnya terkait struktur peta jabatan dapat dilihat pada lampiran 1.1



Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pada Dinas Koperasi dan Makassar

JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN TAHUN 2023

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pengatur / II-c	0
2.	Pengatur Tk I/ II-d	1
3.	Penata Muda/ III-a	3
4.	Penata Muda Tk I/ III-b	5
5.	Penata / III-c	2
6.	Penata Tk.I/ III-d	15
7.	Pembina / IV-a	7
8.	Pembina Tk I/ IV-b	3
9.	Pembina Utama Muda/ IV-c	0
	Total	36

Sumber data dinas koperasi dan UKM Kota Makassar

JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2023

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SMA sederajat	1
2.	D3	2
3.	S-1	21
4.	S-2	12
5.	S-3	0
	Total	36

Sumber data dinas koperasi dan UKM Kota Makassar

JUMLAH LASKAR PELANGI MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2023

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SMA sederajat	10
2.	D3	1
3.	S-1	30
4.	S-2	0
5.	S-3	0
	Total	41

Sumber data dinas koperasi dan UKM Kota Makassar

C. Isu Strategis

3.2 Aspek Strategis

Aspek Strategis Dinas Koperasi UKM, selain dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota juga mewujudkan program Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Dinas Koperasi dan UKM. Dari 17 tujuan global, Dinas Koperasi UKM Kota Makassar berada pada 1 tujuan dan 1 target TPB yaitu :

- Tujuan Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan target TPB menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreatifitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan dengan indikator persentase akses UMKM ke layanan keuangan. Dalam mewujudkan pencapaian target SDGs Dinas Koperasi UKM melalui program pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.

Perumusan permasalahan dan analisis isu strategis merupakan acuan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dinas yang menyesuaikan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Isu strategis merupakan kristalisasi dari permasalahan kinerja Dinas, yang bersumber dari analisis data kondisi tahun 2023, dan telaah terhadap isu strategis regional.

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, kinerja pelayanan dan evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan Dinas Koperasi Usaha, Kecil Menengah serta tantangan yang dihadapi baik skala lokal, nasional bahkan internasional.

Isu-isu strategis berupa peluang dan ancaman yang kemungkinan dihadapi dan harus diantisipasi di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. PELUANG (OPPORTUNITIES)

- a. Meningkatnya SDM Koperasi dan UMKM yang berdayasaing;
- b. Tersedianya sumber permodalan perbankan atau lembaga keuangan.
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana bagi pelaku Koperasi dan UMKM;
- d. Menciptakan Koperasi dan UKM mandiri;
- e. Meningkatnya teknologi antara pelaku bisnis (Market Digital);

2. ANCAMAN (THREATS)

- a. Terbatasnya kemampuan enterpreneur SDM Koperasi dan UMKM;
- b. Masih banyak koperasi dan UMKM yang berorientasi dan bergantung pada bantuan pemerintah;
- c. Masih banyak koperasi dan UMKM yang terkendala dari sisi pembiayaan usaha maupun keterampilan teknis berwirausaha dan manajemen;
- d. Belum optimalnya kemampuan desain dan kemasan, sehingga perlunya tenaga pelatih;
- e. Cashflow , banyak pelaku UMKM yang merasakan pendapatannya menurun akibat tidak adanya pelanggan yang membeli produk;
- f. Berubahnya kebutuhan pasar sesuai permintaan (on demand).

Untuk mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar telah menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan identifikasi mengenai potensi dan pengembangan usaha terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil ,mikro dan menengah.
2. Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku usaha melalui program pendamping.

3. Program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
4. Pengembangan produk lokal unggulan mulai dari bidang pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan, hingga pemasaran terintegrasi sebagai basis usaha koperasi dan UMKM.
5. Penghapusan kemiskinan ekstrem melalui strategi kebijakan memberikan fasilitas untuk pelatihan baik soft skill maupun hard skill
6. scale up dan penguatan digitalisasi produk-produk koperasi & UMKM.
7. Perlunya tenaga pelatih dari luar untuk peningkatan mutu SDM UKM binaan dalam peningkatan usahanya.

D. Landasan Hukum

Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
9. Peraturan Walikota Makassar Nomor 98 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016)
10. Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

E. Sistematika

Adapun sistematika penulisan penyusunan LKjIP sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Umum
- 1.2 Tugas dan Fungsi
- 1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD
- 1.4 Dasar Hukum dan Sistematika.
- 1.5 sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 10.1 Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
- 10.2 Rencana Kerja 2023
- 10.3 Perjanjian Kinerja 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian IKU
- 3.2 Pengukuran
- 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan dalam organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Dengan demikian Renstra merupakan suatu tuntunan atau acuan dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan suatu Daerah/Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dinas Koperasi dan UKM satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai peranan besar terhadap pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kota Makassar dituntut dapat menyusun Rencana Strategis Renstra dalam lima tahun kedepan. Dokumen Renstra Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2021 - 2026 perlu untuk dilakukan penyesuaian sejalan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2021 – 2026.

Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dimana sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Makassar adalah meningkatnya Lembaga koperasi aktif dan koperasi sehat, meningkatnya UKM yang berkualitas dan meningkatnya akuntabilitas Kinerja perencanaan dan pengelola keuangan perangkat daerah. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Makassar tahun 2021-2026. Program dan kegiatan SKPD dokumen Rencana Strategis tersebut setiap tahunnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar untuk selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun 2023.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa Pemerintah bertugas: (1) menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan koperasi; (2) memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi dan (3) memberikan perlindungan kepada Koperasi. Pembinaan Koperasi dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, mengingat Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan

1. Visi

Visi misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Makassar ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Visi Walikota dan Wakil Walikota Makassar adalah “Percepatan Mewujudkan Makassar KOTA DUNIA yang “SOMBERE’ & SMART CITY” dengan IMUNITAS KUAT untuk Semua”. Adapun Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah: 1. Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi 2. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota Yang Kuat Untuk Semua 3. Restorasi ruang Kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “Sombere’ & Smart City “ untuk semua

2. Misi

Aspek strategis pada Dinas Koperasi UKM merupakan penjabaran dari visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota, Adapun aspek strategis Dinas terdapat pada :

✓ Misi ke 1 :

Revolusi SDM dan percepatan reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi, point ke 4 yaitu 10.000 Skill training yang terimplementasikan dalam pemberian pelatihan dan keterampilan untuk program pemberdayaan usaha mikro.

✓ Misi ke 2 :

Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan Kesehatan kota yang kuat untuk semua.

- Point 1 yaitu Gerakan masyarakat perkuat Imunitas Kesehatan ekonomi. UMKM merupakan salah satu sector yang dapat diandalkan sebagai indicator dalam stabilitas perekonomian baik ditingkat local maupun daerah. UMKM sendiri selain roda bisnis juga sebagai pemberdayaan masyarakat pada umumnya, melalui program Pusat inkubator Kota Makassar Dinas Koperasi memberikan pendampingan dan penguatan sektor UMKM baik dari segi kuantitas, kualitas dan legalitas serta Dgitalisasi UMKM di Kota Makassar, diharapkan UMKM di Kota Makassar dapat berkembang, berdaya saing baik pada tingkat local, nasional hingga menembus pasar ekspor. Selain

Pengembangan UMKM, Dinas Koperasi UKM Kota Makassar melaksanakan pendampingan dan penguatan Koperasi di kota Makassar melalui pelatihan-pelatihan seperti digitalisasi Koperasi, Gerakan masyarakat sadar Koperasi, pendampingan KSP/USP sebagai Lembaga pendukung permodalan UMKM dan Koperasi, penerapan teknologi modern dalam manajemen usaha Koperasi. Dinas Koperasi UKM selain memberikan pendampingan dan penguatan Koperasi melalui pelatihan, juga mendorong terbentuknya Koperasi baru dengan menginisiasi pembentukan Badan Usaha Lorong (BULO) yang pada akhirnya beberapa Bulo yang telah terbentuk dihimpun dalam satu wadah Koperasi.

- Point 3 yaitu penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru. Melalui program dan kegiatan pada Dinas Koperasi UKM yang salah satunya adalah Inkubator Center yang mana sarannya adalah munculnya pelaku usaha baru dan pengembangan usaha UMKM, dengan bertambahnya pelaku usaha baru dan peningkatan skala usaha UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, dalam menunjang terbentuknya peluang usaha baru, Dinas Koperasi UKM memberikan fasilitasi kemudahan akses permodalan.

✓ **Misi ke 3 :**

Restorasi ruang Kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere & smart city” untuk semua.

Point 5 yaitu peningkatan Lorong garden dan pembentukan 5000 lorong wisata, Dinas Koperasi pada point 5 sebagai supporting dalam pengembangan kegiatan ekonomi Lorong yang berbasis green, kuliner dan kerajinan. Dinas Koperasi UKM melaksanakan penguatan kelembagaan dan pembentukan Badan Usaha Lorong (BULO) pada Lorong wisata yang menjadi cikal bakal pembentukan Koperasi. Pada sektor UMKM, Salah satu sasaran Program pada Dinas Koperasi UKM adalah pelaku UMKM yang bermosili di Lorong wisata berupa pengembangan dan peningkatan skala usaha serta masyarakat di Lorong wisata yang memiliki minat untuk memulai usaha.

3. Tujuan dan Sasaran

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berdaya saing	Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi aktif	75%	75%	78%	80%	80%
			Persentase Koperasi yang sehat	59,60 %	61,58 %	64,23 %	67,54 %	72,84 %
		Meningkatnya UKM yang berkualitas	Digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah	20%	20%	20%	20%	20%
			Pertumbuhan Wirausaha baru	10%	10%	10%	15%	15%
2	Mewujudkan Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	A	A
			Penurunan Temuan berdasarkan LHP	90%	90%	100%	100%	100%

4. Indikator Kinerja Utama

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berdaya saing					
	Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi aktif	%		$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Koperasi Keseluruhan}} = x 100$	Sumber data ODS
		Persentase Koperasi yang sehat	%		$\frac{\text{Jumlah KSP / USP yang dinilai}}{\text{Jumlah KSP/USP Keseluruhan}} = X 100$	Sumber data bidang Pembiayaan
	Meningkatnya UKM yang berkualitas	Digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah	%		$\frac{\text{Pertumbuhan Wirausaha Baru}}{\text{Usaha Mikro}} = x 100$	Sumber data Inkubator UMKM dan Sidatu Miciko
		Pertumbuhan Wirausaha baru	%		$\frac{(N-1)-(N)}{\text{Nilai Awal}} = x 100$	Sumber data bidang UKM

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Mewujudkan Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi					
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelola keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai			Sesuai dengan hasil LHP
		Penurunan Temuan berdasarkan LHP	%			Sesuai dengan LHP

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Tabel.2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023
Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berdaya saing	Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi aktif	%	78
			Persentase Koperasi yang sehat	%	64,23
		Meningkatnya UKM yang berkualitas	Digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah	%	20
			Pertumbuhan Wirausaha baru	%	10
	Mewujudkan Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelola keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	%	BB
			Penurunan Temuan berdasarkan LHP	%	100

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur Negara dalam menyukseskan pembangunan nasional.

Perjanjian Kinerja tahun 2023 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran kinerja, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program serta anggaran yang disediakan. Perjanjian Kinerja dan targetnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2023 menetapkan 3 Sasaran dengan 6 Indikator Kinerja yang kemudian dilaksanakan dalam 8 Program dengan 16 Kegiatan

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel.2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1.	Meningkatnya Lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Aktif	%	78
		Persentase Koperasi Simpan Pinjam Yang Sehat	%	64
2.	Meningkatnya UKM yang	Digitalisasi Usaha Kecil dan	%	20

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
	Berkualitas	Menengah		
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	10
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB
		Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	%	100

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar
Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	9.439.177.582
		Persentase ASN Perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	
		Persentase Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	
2.	Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase BPR/LKM Aktif	48,27%	970.155.000
3.	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi Yang Diawasi Dan Diperiksa	13,05%	1.517.948.400
4.	Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang Sehat	64,23%	1.129.513.200
5.	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Mendapat Pendidikan Dan	1,62%	203.564.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Pelatihan		
6.	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	25,13%	2.124.216.000
7.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor UMKM	520 UMKM	5.047.816.700
		Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	89,99%	
8.	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Wirausaha Baru (Start-Up)	10 UMKM	10.728.542.572
		Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	79%	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 8 (Tujuh) Program (7 program strategis dan 1 program operasional) dan 16 kegiatan yaitu 8 kegiatan penunjang dan 8 kegiatan utama 48 sub kegiatan walaupun di tahun 2023 pemerintah kota atau Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar masih menghadapi perbaikan atau peningkatan ekonomi khususnya di Usaha Kecil Menengah yang menjadi tugas utama Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar untuk meningkatkan perekonomian. Jumlah pagu anggaran pokok Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebesar Rp.67.404.742.000; (Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp.31.160.933.454; (Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebesar 144% dari total penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp.25.877.163.175; (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau 83,04%.

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kerja

No	Kategori/Interprestasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	91% ≤ 100%
2	Baik	76% ≤ 90%
3	Cukup	66% ≤ 75%
4	Kurang	51% ≤ 65%
5	Sangat Kurang	≤ 50%

Dalam pelaksanaan mengalami beberapa perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebagai berikut :

1. Pada Parsial 2 (Dua) mengalami perubahan header di Program Pengembangan UMKM dengan sub kegiatan Pertama **Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran. SDM, serta Desain dan Teknologi** dengan adanya perubahan atau tambahan di Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor – Souvenir/Cendera Mata sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) pada item Belanja Goody Bag sebanyak 800 buah di Header Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2023.
2. Pada Parsial 3 (Tiga) di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** dengan adanya perubahan atau tambahan dikarenakan ada Utang Belanja TA 2022 pada Belanja Modal Komputer sebesar Rp. 256.440.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yaitu item Belanja Komputer PC All In One.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
I.	Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berdaya saing						
1	Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi aktif	78%	53,59%	69%	Sedang	Sumber data dari ODS
		Persentase Koperasi yang sehat	64%	64,15%	100%	Sangat Tinggi	Sumber data bidang pembiayaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
2	Meningkatnya UKM yang berkualitas	Digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah	20%	7,69%	38%	Sangat Rendah	Sumber data incubator UMKM dan Sidatu Miciko
		Pertumbuhan Wirausaha baru	10%	13,44%	134%	Sangat Tinggi	Sumber data Bidang UKM
II.	Mewujudkan Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi						
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelola keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%	Sangat Tinggi	Sesuai dengan hasil LHP
		Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Sesuai dengan hasil LHP

Sumber data Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Pada tabel diatas 3.2 capaian indikator kinerja utama dengan sasaran utama yang pertama (1). Meningkatnya Lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat terdiri dari 2 indikator yaitu : (1) persentase koperasi aktif dengan target sebesar 78% dengan realisasi sebesar 53,59% atau capaian rata-rata sebesar 69% dengan kategori **Sedang**. (2) Persentase koperasi yang sehat dengan target sebesar 64% dengan realisasi sebesar 64,15% atau capaian rata-rata sebesar 100% dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Sasaran utama yang kedua (2). Meningkatnya UKM yang berkualitas terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu : (1) Digitalisasi usaha kecil dan menengah dengan target sebesar 20% dengan realisasi kinerja sebesar 7,69% atau capaian rata-rata sebesar 38% dengan kategori **Sangat Rendah**. (2) Pertumbuhan Wirausaha baru dengan target sebesar 10% dengan realisasi kinerja sebesar 13,44% atau capaian rata-rata sebesar 134% dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Sasaran utama yang ketiga (3). Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelola keuangan perangkat daerah terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu : (1) Nilai akuntabilitas kinerja dengan target kinerja Nilai BB dengan realisasi kinerja BB atau capaian rata-rata 100% dengan kategori **Sangat Tinggi**. (2) Penurunan temuan berdasarkan LHP dengan target kinerja 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100% atau capaian rata-rata sebesar 100% dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berdaya saing							
	Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi aktif	75%	53%	70%	78%	53,59%	69%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
		Persentase Koperasi yang sehat	62%	63%	101%	64%	64,15%	100%
	Meningkatnya UKM yang berkualitas	Digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah	20%	20%	100%	20%	7,69%	38%
		Pertumbuhan Wirausaha baru	10%	10%	100%	10%	13,44%	134%
2	Mewujudkan Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi							
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%	BB	BB	100%
		Penurunan Temuan	90%	90%	100%	100%	100%	100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
		berdasarkan LHP						

Sumber data Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Pada tabel 3.3 diatas dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 dengan sasaran utama Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar terdiri dari 3 sasaran yaitu sasaran (1). Meningkatnya Lembaga koperasi aktif dan koperasi sehat terdiri dari 2 indikator yaitu : (1) Persentase koperasi aktif di tahun 2022 dengan target sebesar 75% dengan realisasi kinerja sebesar 53% atau capaian rata-rata sebesar 70% sedangkan di tahun 2023 dengan target sebesar 78% dengan realisasi kinerja sebesar 53,59% atau capaian rata-rata sebesar 69%. Indikator kinerja kedua (2) Persentase koperasi yang sehat di tahun 2022 dengan target kinerja sebesar 62% dengan realisasi kinerja sebesar 63% atau capaian rata-rata sebesar 101% sedangkan pada tahun 2023 dengan target sebesar 64% dengan realisasi kinerja sebesar 64,15% atau capaian rata-rata sebesar 100%

Sasaran kedua (2). Meningkatnya UKM yang berkualitas terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu : (1) Digitalisasi usaha kecil dan menengah di tahun 2022 dengan target kinerja sebesar 20% dengan realisasi kinerja sebesar 20% atau capaian rata-rata sebesar 100% sedangkan pada tahun 2023 dengan target kinerja sebesar 20% dengan realisasi kinerja sebesar 7,69% atau capaian rata-rata sebesar 38%. Indikator kinerja kedua (2) Pertumbuhan Wirausaha baru di tahun 2022 dengan target sebesar 10% dengan realisasi kinerja sebesar 10% atau capaian rata-rata sebesar 100%. Sedangkan tahun 2023 dengan target kinerja sebesar 10% dengan realisasi kinerja sebesar 13,44% atau capaian rata-rata sebesar 134%.

Sasaran ketiga (3). Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelola keuangan perangkat daerah terdiri 2 indikator kinerja yaitu (1) nilai akuntabilitas kinerja di tahun 2022 dengan target kinerja nilai BB dengan realisasi kinerja BB atau capaian rata-rata 100% sedangkan tahun 2023 dengan target nilai BB dengan realisasi kinerja BB atau capaian rata-rata sebesar 100% dapat dilihat tidak ada penurunan atau kenaikan dari realisasi sehingga apa yang ditargetkan di tahun 2022 dan 2023 sudah memenuhi target yang

ditentukan. Indikator kinerja kedua (2) Penurunan temuan berdasarkan LHP ditahun 2022 dengan target kinerja sebesar 90% dengan realisasi kinerja sebesar 90% atau capaian rata-rata sebesar 100% sedangkan di tahun 2023 dengan target kinerja naik 10% dibandingkan tahun lalu sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100% atau capaian rata-rata sebesar 100%. Dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja di sasaran 3 (ketiga) sudah memenuhi target yang ditentukan.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar periode 2022-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
	Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berdaya saing				
	Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi aktif	53,59%	80%	66%
		Persentase Koperasi yang sehat	64,15%	76,15%	84%
	Meningkatnya UKM yang berkualitas	Digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah	7.69%	20%	38%
		Pertumbuhan	13.44%	15%	89%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
		Wirausaha baru			
	Mewujudkan Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelola keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	A	A
		Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100%	100%	100%

Sumber data Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Pada tabel 3.4 Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis di tujuan 1 (satu) Mewujudkan koperasi, usaha kecil dan menengah yang berdaya saing terdiri dari 2 sasaran utama yaitu : (1) Meningkatkan Lembaga koperasi aktif dan koperasi sehat terdiri dari 2 (dua) indikator, indikator pertama (1) Persentase koperasi aktif dengan realisasi tahun 2023 sebesar 53,59% dengan target akhir 2023 sebesar 80% dengan tingkat kemajuan 66% hal ini menjadi ukuran bahwa walaupun tidak mencapai 100% tetapi setidaknya tingkat kemajuan sudah diatas 50%. Indikator kedua (2) Persentase koperasi yang sehat dengan realisasi tahun 2023 sebesar 64,15% dengan target akhir tahun 2023 sebesar 76,15% dengan tingkat kemajuan 84% dengan sudah naiknya tingkat sadar koperasi untuk memajukan dan pentingnya koperasi yang sehat.

Sasaran kedua (2) Meningkatkan UKM yang berkualitas terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu : indikator pertama (1) Digitalisasi usaha kecil dan menengah dengan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 7,69% dengan target akhir 2023 sebesar 20% dengan tingkat kemajuan

sebesar 38% rendahnya tingkat kemajuan digitalisasi usaha kecil dan menengah dikarenakan tingginya jumlah usaha mikro 26.393 sedangkan jumlah usaha mikro yang di inkubasi hanya 2031 usaha mikro sehingga belum mencapai apa yang ditargetkan. Indikator kedua (2) Pertumbuhan wirausaha baru dengan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 13,44% dengan target akhir 2023 sebesar 15% dengan tingkat kemajuan sebesar 89% walaupun belum mencapai 100% tetapi tingkat kemajuan sudah melebihi diatas 80%.

Tujuan kedua (2) Mewujudkan Dinas Koperasi dan UKM yang professional dan berkinerja tinggi dengan sasaran utama meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelola keuangan daerah terdiri dari 2 indikator yaitu : (1) Akuntabilitas kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 nilai BB dengan akhir 2023 nilai A dengan tingkat kemajuan A indikator kedua (2) Penurunan temuan berdasarkan LHP dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% dengan target akhir sebesar 100% sehingga tingkat kemajuan 100%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berdaya saing						
	Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi aktif	78%	53,59%	69%	Persentase koperasi aktif dengan target 78% dengan realisasi 53,59% atau dengan capaian 69% walaupun belum mencapai dari target selisih 9% hal ini disebabkan kurangnya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Dinas Koperasi senantiasa melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada pengurus koperasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Persentase Koperasi yang sehat	64%	64,15%	100%	Persentase koperasi yang sehat dengan target 64% dengan realisasi sebesar 64,15% atau dengan capaian 100% sudah memenuhi target atau mencapai keberhasilan	Mendorong koperasi untuk melakukan penilaian kesehatan dengan memberikan dukungan kesiapan administrasi yang diperlukan serta meningkatkan kualitas pegawai yang akan menilai kesehatan koperasi
	Meningkatnya UKM yang berkualitas	Digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah	20%	7,69%	38%	Digitalisasi usaha kecil dan menengah dengan target sebesar 20% dengan realisasi sebesar 7,69% atau dengan capaian 38% dalam hal ini pencapaian belum memenuhi target disebabkan jumlah UMKM yang di inkubasi masih rendah	Mengusulkan tambahan jumlah kegiatan di tahun anggaran selanjutnya terkait peningkatan potensi usaha dan pemanfaatan teknologi digital yang sangat diperlukan oleh usaha mikro
		Pertumbuhan	10%	13,44%	134%	Pertumbuhan wirausaha baru dengan target sebesar 10% dengan	Memaksimalkan sosialisasi manfaat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Wirusaha baru				realisasi sebesar 13,44% atau capaian sebesar 134%	dalam mengikuti bimbingan teknis dan memaksimalkan pendataan UMKM diseluruh wilayah Kota Makassar
2	Mewujudkan Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi						
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	100%	100%	Nilai akuntabilitas kinerja dengan target BB dengan realisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 100%	Tupoksi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sudah berjalan dengan baik hanya perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi
		Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100%	100%	100%	Penurunan temuan berdasarkan LHP dengan target sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100% atau capaian 100%	Tupoksi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sudah berjalan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							dengan baik hanya perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi

Sumber data Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Pada tabel 3.6 Analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi dengan Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Koperasi Sehat terdiri dari 2 indikator dengan indikator kinerja pertama (1) Persentase Koperasi aktif dengan target 78% dengan realisasi 53,59% atau dengan capaian 69% walaupun belum mencapai dari target selisih 9% hal ini disebabkan kurangnya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Solusi Dinas Koperasi senantiasa melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada pengurus koperasi. Indikator kinerja kedua (2) Persentase koperasi yang sehat dengan target 64% dengan realisasi sebesar 64,15% atau dengan capaian 100% sudah memenuhi target atau mencapai keberhasilan, solusi Dinas Koperasi dan UKM Mendorong koperasi untuk melakukan penilaian kesehatan dengan memberikan dukungan kesiapan administrasi yang diperlukan serta meningkatkan kualitas pegawai yang akan menilai kesehatan koperasi.

Sasaran 2 yaitu Meningkatnya UKM yang berkualitas terdiri dari 2 indikator kinerja dengan indikator kinerja pertama (1) Digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah dengan target sebesar 20% dengan realisasi sebesar 7,69% atau dengan capaian 38% dalam hal ini pencapaian belum memenuhi target disebabkan jumlah UMKM yang di inkubasi masih rendah, solusi Dinas Koperasi dan UKM Mengusulkan tambahan jumlah kegiatan di tahun anggaran selanjutnya terkait peningkatan potensi usaha dan pemanfaatan teknologi digital yang sangat diperlukan oleh usaha mikro. Indikator kinerja kedua (2) Pertumbuhan wirausaha baru dengan target sebesar 10% dengan realisasi sebesar 13,44% atau capaian sebesar 134%, solusi Dinas Koperasi dan UKM Memaksimalkan sosialisasi manfaat dalam mengikuti bimbingan teknis dan memaksimalkan pendataan UMKM diseluruh wilayah Kota Makassar.

Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelola keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 indikator kinerja dengan indikator pertama (1) Nilai akuntabilitas kinerja dengan target BB dengan realisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 100%, Tupoksi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sudah berjalan dengan baik hanya perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Indikator kedua (2) Penurunan Temuan berdasarkan LHP dengan target sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100% atau capaian 100%, Tupoksi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sudah berjalan dengan baik hanya perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
	Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berdaya saing						
	Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi aktif	69%	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Mendapat Pendidikan Dan Pelatihan	38,83%	Tidak menunjang
				Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	167%	Menunjang
		Persentase Koperasi	100%	Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase BPR/LKM Aktif	107%	Menunjang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
		yang sehat					
				Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi Yang Diawasi Dan Diperiksa	130%	Menunjang
				Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang Sehat	99,88%	Menunjang
	Meningkatnya UKM yang berkualitas	Digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah	38%	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor UMKM	218%	Menunjang
					Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirusaha	14%	Tidak Menunjang
		Pertumbuhan Wirusaha baru	134%	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Wirusaha Baru (Start-Up)	210%	Menunjang
					Persentase Usaha Mikro	125%	Menunjang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
					Dan Kecil		
	Mewujudkan Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi						
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase keterseediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
		Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase keterseediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang

Sumber data Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Pada tabel 3.7 Analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan dengan sasaran Pertama (1)Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Koperasi Sehat terdiri dari 2 indikator yaitu (1)Persentase Koperasi aktif dengan Program Pendidikan dan latihan perkoperasian dengan indikator kinerja Persentase SDM koperasi yang mendapat Pendidikan dan pelatihan dengan capaian sebesar 38,83% dengan rendahnya capaian sehingga dikategorikan *Tidak Menunjang*. Sedangkan Program Pemberdayaan dan

perlindungan koperasi dengan indikator kinerja meningkatnya koperasi yang berkualitas dengan capaian 167% dikategorikan *Menunjang* dikarenakan pencapaian sudah melebihi diatas 78% dari standar kategori yang ditentukan. (2) Persentase Koperasi yang sehat dengan Program Pelayanan Izin usaha simpan pinjam dengan indikator kinerja persentase BPR/LKM aktif dengan capaian 107% dikategorikan *Menunjang*. Sedangkan Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan indikator kinerja Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa dengan capaian sebesar 130% dengan kategori *Menunjang*. Dan program yang ketiga yaitu Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dengan indikator kinerja Persentase KSP/USP Koperasi yang Sehat dengan capaian sebesar 99,88% dengan kategori *Menunjang*.

Sasaran kedua (2) Meningkatnya UKM yang berkualitas terdiri 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja pertama (1) Digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah dengan Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu (1) Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor UMKM dengan capaian sebesar 218% kategori *Menunjang*. (2) Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha dengan capaian sebesar 14% dikategorikan *Tidak Menunjang*. Indikator kinerja kedua (2) Pertumbuhan Wirausaha baru dengan Program Pengembangan UMKM terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu (1) Jumlah Wirausaha Baru (Start-Up) dengan capaian sebesar 210% dikategorikan *Menunjang*. (2) Persentase Usaha Mikro Dan Kecil dengan capaian sebesar 125% dikategorikan *Menunjang*.

Sasaran Ketiga (3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelola keuangan Perangkat Daerah Terdiri dari 2 indikator Kinerja yaitu (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja dan (2) Penurunan Temuan berdasarkan LHP, kedua indikator dengan program yang sama Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah dengan capaian 100% dengan kategori *Menunjang*.

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	<i>Meningkatnya Lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat</i>
----------	--

Capaian sasaran *Meningkatnya lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi sehat* yang diukur dengan 2 indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Koperasi aktif	Persentase(%)	78%	53,59%	69%
Persentase Koperasi Simpan Pinjam Yang Sehat	Persentase(%)	64%	64,15%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran				84%

Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM 2023

Indikator kinerja **pertama** yaitu Persentase koperasi aktif dengan target sebesar 78% dengan realisasi kinerja sebesar 53,59% sehingga capaian realisasi kinerja 69%. Indikator **kedua** yaitu Persentase koperasi simpan pinjam yang sehat dengan target sebesar 64% dengan realisasi 64,15% dengan capaian kinerja sebesar 100% koperasi memiliki harapan penting bagi ekonomi, perannya dianggap sangat penting dan mendasar oleh karena itu koperasi harus dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya. “Pemulihan Ekonomi Melalui Kedaulatan Pangan dan Energi Bersama Koperasi”. Perubahan lewat digitalisasi menjadi unsur penting untuk menjangkau pemulihan ekonomi.

a. Persentase Koperasi Aktif



Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar 2023

Dari data grafik perkembangan koperasi aktif selama tahun 2019-2023 pada tahun 2023 diperoleh fakta bahwa jumlah koperasi aktif 1.059 unit koperasi atau sebesar

53,59% dari total koperasi 1.976 koperasi (unit) capaian kinerja ini belum mencapai capaian kinerja yang ditarget sebesar 78%. Dapat juga dilihat pada lampiran 3.1.1

Adapun faktor pendorong dari indikator ini adalah :

- Meningkatnya kesadaran pengurus dan anggota koperasi untuk memberdayakan dan menggunakan sebagai instrumen ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya;
- Adanya peningkatan kelembagaan khususnya bagi koperasi tidak aktif minimal 3 tahun buku tidak melaksanakan RAT maka badan hukumnya akan dibekukan dan kemudian dibubarkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor : 114/Kop/M.KUKM/XII/2016 tentang pembubaran koperasi sehingga pengurus koperasi merasa berkewajiban senantiasa mengaktifkan koperasinya.
- Dinas koperasi dan UKM senantiasa melaksanakan koordinasi dan monitoring dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

- Beberapa Koperasi kesulitan dalam hal penyajian laporan keuangannya sehingga menghambat pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan yang sebaiknya dilaksanakan di awal tahun

Adapun langkah-langkah ke depan untuk meningkatkan kembali atau mengatasi kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai target kinerja jumlah Koperasi Aktif yaitu sebagai berikut:

- Dinas Koperasi dan UKM senantiasa melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada Pengurus Koperasi;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Koperasi;
- Memberikan pelatihan-pelatihan tentang tata kelola kegiatan/unit Koperasi serta penatausahaan dan pembukuan laporan Koperasi.

Berikut ini adalah data jumlah Koperasi aktif yang ada di Kota Makassar Tahun 2023 :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

No	KELOMPOK KOPERASI	KETERANGAN
1.	KUD	6
2.	Koperasi Pertanian	9
3.	Koperasi Perkebunan	1
4.	Koperasi Peternakan	3
5.	Koperasi Nelayan	8
6.	Kopinkra	0
7.	Koppontren	7
8.	Kopkar	94
9.	Kop.Angkatan Darat	42
10.	Kop.Angkatan Laut	3
11.	Kop.Angkatan Udara	1
12.	Kop.Kepolisian	5
13.	Koperasi Serba Usaha	193
14.	Koperasi Pasar	1
15.	Koperasi Simpan Pinjam	74
16.	Koperasi Angkutan Darat	3
17.	Kop.Wisata	0
18.	Koperasi Telkom	1
19.	Koperasi perumahan	1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

No	KELOMPOK KOPERASI	KETERANGAN
20	Kop.Pegawai Negeri (KPRI)	121
21	Koperasi Asuransi Indonesia	1
22	Kop.Wanita	24
23	Kop.Profesi	1
24	Kop.Veteran	0
25	Kop.Wredatama	1
26	Kop.Pepabri	2
27	Kop.Mahasiswa	5
28	Kop.Pemuda	4
29	Kop.Pedagang Kaki Lima	1
30	Kop.Lainnya	432
31	Kop.Simpan Pinjam dan Pembiayaan	14
32	Kop.Tenaga Kerja Bongka	1
Jumlah		1059

Sumber data : sistem ODS Kementerian 2023

Dokumentasi 1. Penyusunan Laporan RAT Bagi Koperasi Angkatan I



Dokumentasi I. Penyusunan Laporan RAT Bagi Koperasi Angkatan II



Dokumentasi I. Penyusunan Laporan RAT Bagi Koperasi Angkatan III



Dokumentasi I. Penyusunan Laporan RAT Bagi Koperasi Angkatan IV



Dokumentasi I. Penyusunan Laporan RAT Bagi Koperasi Angkatan IV



Adapun data pilah gender peserta yang telah mengikuti pelatihan sebagai berikut

Bidang Kelembagaan

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL	JENIS KELAMIN		UTUSAN
			L	P	
1	Revitalisasi Koperasi/Bulo/KWB di Lorong Wisata	19 Oktober 2023	38	59	KOPERAS I
2	Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) Angkatan Ke - III	10 Agustus 2023	18	82	UKM
3	Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) Angkatan Ke - II	29 Mei 2023	23	77	UKM
4	Fasilitasi Akses Pembiayaan Kepada Para Kelompok Wirausaha Baru dan Koperasi Usulan Musrenbang (Kec. Bontoala, Kel. Parang Layang, Kec. Mariso, Kel. Mario) Usulan Reses/Pokir Angkatan Ke - I	27 Juli 2023	30	70	UKM
5	Penerapan Teknologi Modern dalam Manajemen Usaha Koperasi Angkatan Ke - III	05 Oktober 2023	38	37	KOPERAS I
6	Fasilitasi Akses Pembiayaan Kepada Para Kelompok Wirausaha Baru dan Koperasi Usulan Musrenbang (Kec. Bontoala, Kel. Parang Layang, Kec. Mariso, Kel. Mario) Usulan Reses/Pokir Angkatan Ke - II	14 Agustus 2023	30	70	UKM
7	Fasilitasi Akses Pembiayaan Kepada Para Kelompok Wirausaha Baru dan Koperasi Usulan Musrenbang (Kec. Bontoala, Kel. Parang Layang, Kec. Mariso, Kel. Mario) Usulan Reses/Pokir Angkatan Ke - III	23 Agustus 2023	26	74	UKM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL	JENIS KELAMIN		UTUSAN
			L	P	
8	Penyusunan Laporan RAT bagi Koperasi Angkatan Ke - V	04 Mei 2023	23	77	KOPERAS I
9	Penyusunan Laporan RAT bagi Koperasi Angkatan Ke - I	02 Maret 2023	48	52	KOPERAS I
10	Penyusunan Laporan RAT bagi Koperasi Angkatan Ke - II	08 Maret 2023	42	58	KOPERAS I
11	Pendampingan KSP/USP sebagai Lembaga Pendukung Permodalan UMKM dan Koperasi pada Lorong Wisata (Kec. Mamajang dan Kec. Mariso)	16 Juni 2023	56	98	UKM
12	FGD Upaya Pembentukan Ekonomi Baru dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Lorong Wisata melalui BULO	25 Juli 2023	42	38	UKM
13	Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam di Lorong Wisata dalam Penerapan Undang-Undang Perkoperasian Angkatan Ke - II	06 Juli 2023	45	55	KOPERAS I
14	Pendampingan KSP/USP sebagai Lembaga Pendukung Permodalan UMKM dan Koperasi pada Lorong Wisata (Kec. Tallo dan Kec. Tamalanrea)	19 Juni 2023	64	97	UKM
15	Pendampingan KSP/USP sebagai Lembaga Pendukung Permodalan UMKM dan Koperasi pada Lorong Wisata (Kec. Makassar dan Kec. Manggala)	15 Juni 2023	59	95	UKM
16	Penyusunan Laporan RAT bagi Koperasi Angkatan Ke - IV	10 Maret 2023	48	52	KOPERAS I

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL	JENIS KELAMIN		UTUSAN
			L	P	
17	Penyusunan Laporan RAT bagi Koperasi Angkatan Ke - III	09 Maret 2023	47	53	KOPERAS I
18	Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam di Lorong Wisata dalam Penerapan Undang-Undang Perkoperasian Angkatan Ke - I	04 Juli 2023	57	43	KOPERAS I
19	Pendampingan KSP/USP sebagai Lembaga Pendukung Permodalan UMKM dan Koperasi pada Lorong Wisata (Kec. Tamalate dan Kec. Biringkanaya)	27 Juni 2023	50	104	UKM
20	Pendampingan KSP/USP sebagai Lembaga Pendukung Permodalan UMKM dan Koperasi pada Lorong Wisata (Kec. Bontoala dan Kec. Ujung Pandang)	13 Juni 2023	57	97	UKM

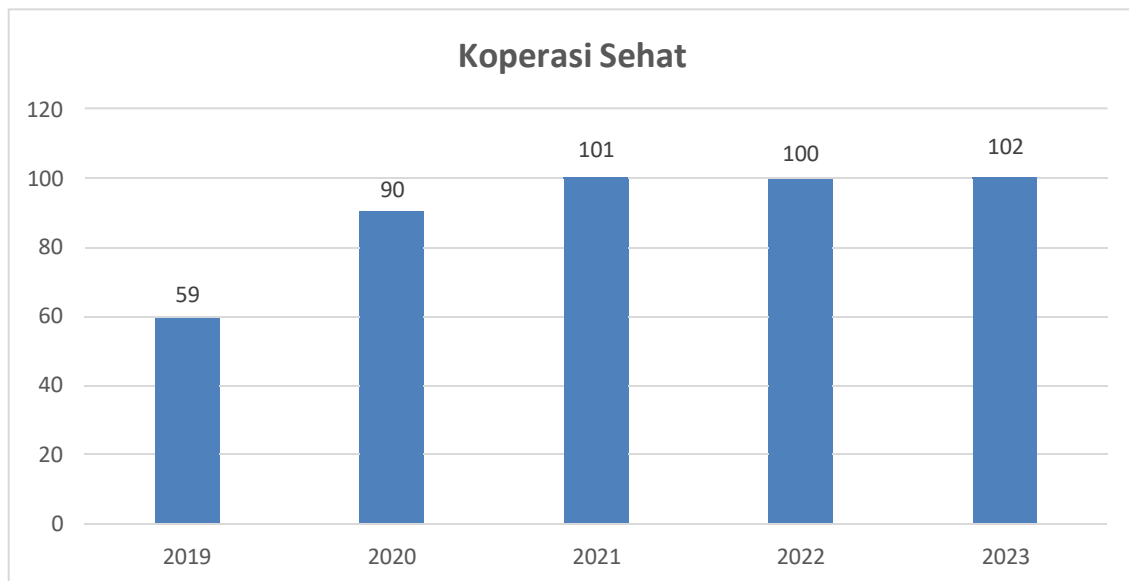
Sumber data Dinas Koperasi dan UKM 2023

Pada tabel data pilah gender diatas kebanyakan yang menghadiri kegiatan pelatihan koperasi adalah kebanyakan laki-laki walaupun perbandingan tidak terlalu jauh dibandingkan dengan perempuan.

b. Persentase Koperasi Sehat

Indikator kedua yaitu Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat. jumlah keseluruhan KSP/USP adalah sebesar 159 Unit. Dari 159 unit koperasi yang telah dinilai kesehatannya terdapat 102 unit yang tergolong dalam kategori sehat atau Koperasi yang dilakukan penilaian sebesar 64,15%

Perkembangan koperasi sehat selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan dalam grafik berikut:



Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Jumlah koperasi sehat tahun 2022 sebesar 100 unit mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 102 unit walaupun kenaikan tidak terlalu signifikan tetapi sudah ada progress yang terlihat akan kesadaran pentingnya koperasi sehat. Dapat juga dilihat pada lampiran 3.1.2

Adapun faktor pendorong dari indikator ini sebagai berikut :

- Dalam penilaian kesehatan koperasi, faktor pendukung melibatkan pengelola koperasi yang kooperatif dan transparan pengelolaan keuangan oleh pengurus koperasi, penerapan kebijakan yang baik dan keterlibatan aktif koperasi dalam proses penilaian kesehatan

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

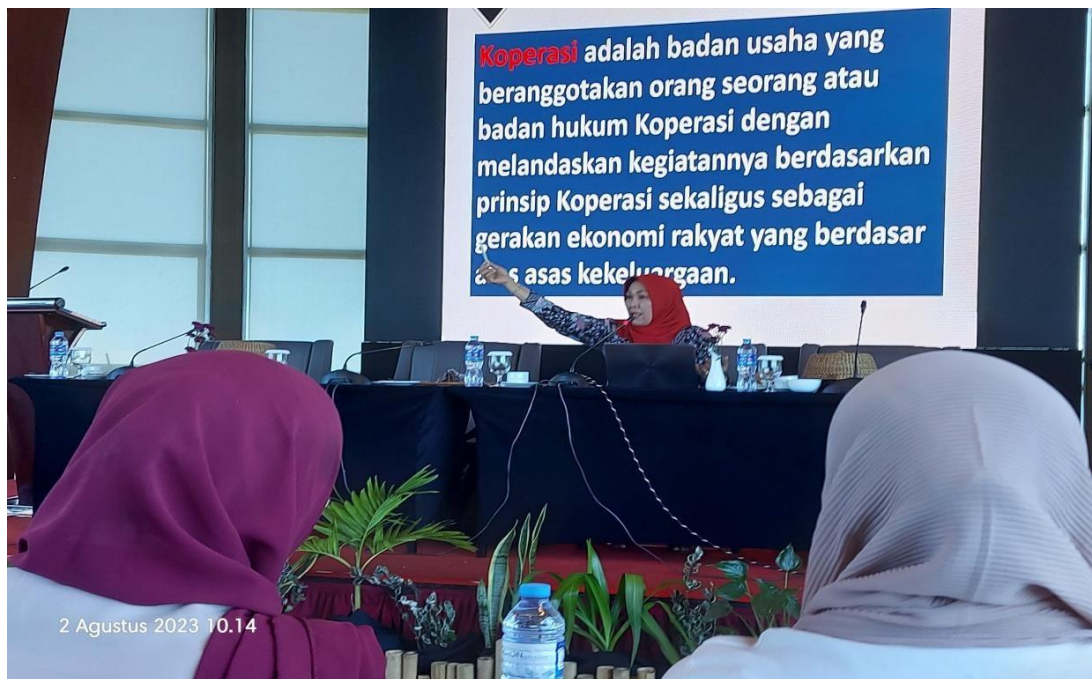
- Keterbatasan akses terhadap data dan informasi yang akurat dapat menjadi hambatan dalam melakukan evaluasi yang tepat terhadap kondisi keuangan dan operasional koperasi. Selain itu, terdapat keterbatasan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia (SDM) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas sebagai pengawas koperasi

Adapun tindak lanjut atau langkah kedepannya sebagai berikut :

- Mendorong koperasi untuk melakukan penilaian kesehatan dengan memberikan dukungan kesiapan administrasi yang diperlukan serta meningkatkan kualitas pegawai yang akan menilai kesehatan koperasi

Dokumentasi 1. PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BAGI PENGURUS KSP/USP KOPERASI LONGWIS

(ANGKATAN I)



Dokumentasi 2. PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BAGI PENGURUS KSP/USP KOPERASI LONGWIS

(ANGKATAN II)



Dokumentasi 3. PENGHARGAAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BAGI PELAKU KSP/USP KOPERASI LONGWIS (ANGKATAN I)



Dokumentasi 4. PENGHARGAAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BAGI PELAKU KSP/USP
KOPERASI LONGWIS

(ANGKATAN II



Adapun data pilah gender peserta yang telah mengikuti pelatihan sebagai berikut :

Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam

NO.	NAMA KEGIATAN	WAKTU PELAKSAAN KEGIATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN
1	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BAGI PENGURUS KSP/USP KOPERASI LONGWIS (ANGKATAN I)	2 AGUSTUS 2023	59	41
2	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BAGI PENGURUS KSP/USP KOPERASI LONGWIS (ANGKATAN II)	26 SEPTEBER 2023	44	56
3	PENGHARGAAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BAGI PELAKU KSP/USP KOPERASI LONGWIS (ANGATAN I)	25 SEPTEBER 2023	52	48
4	PENGHARGAAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BAGI PELAKU KSP/USP KOPERASI LONGWIS (ANGATAN II)	17 OKTOBER 2023	63	37

Sumber data Dinas Koperasi dan UKM 2023

Pada tabel data pilah gender diatas jumlah perempuan lebih banyak yang mengikuti kegiatan dibandingkan laki-laki perbandingan tidak terlalu jauh dengan perempuan sehingga dalam keikutsertaan peserta kegiatan terlihat kesetaraan gender.

2 **Meningkatnya UKM yang berkualitas**

Capaian sasaran *Meningkatnya UKM yang berkualitas* yang diukur dengan 2 indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah	Persentase(%)	20%	7,69%	38%
Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase(%)	10%	13,44%	134%
Rata-rata Capaian Sasaran				86%

Indikator kinerja **pertama** yaitu Digitalisasi usaha kecil dan menengah dengan target sebesar 20% dengan realisasi kinerja sebesar 7,69% sehingga capaian realisasi kinerja 38% hal ini Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transaksi *online* dan juga banyaknya orang yang mulai tertarik melakukan proses jual-beli secara *online*, terlepas dari adanya pandemi atau tidak, membuat para pelaku bisnis yang bergerak di bidang usaha mikro kecil menengah harus mulai mempertimbangkan untuk memigrasikan bisnisnya ke platform digital. Indikator **kedua** yaitu Pertumbuhan wirausaha baru dengan target sebesar 10% dengan realisasi 13,44% dengan capaian kinerja sebesar 134% dikarenakan tingginya tingkat pertumbuhan UMKM dengan semakin mudahnya berwirausaha terutama dengan mempertimbangkan adanya perubahan perilaku transaksi yang ada di masyarakat melalui digitalisasi sehingga dengan mudahnya para pelaku UKM mengembangkan usahanya.

Adapun faktor pendorong dari capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- Antusiasme dan partisipasi aktif dari peserta bimbingan teknis UMKM dalam mengikuti kegiatan, baik dalam diskusi, tanya jawab, maupun praktik.
- UMKM mendapat atensi untuk Program pemulihan Ekonomi Nasional sehingga mendapat tambahan Anggaran

- Pembinaan UMKM melalui program pusat inkubator UMKM Kota Makassar

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

1. Peserta bimbingan teknis yang diundang mendadak berhalangan hadir pada saat hari pelaksanaan karena berbagai alasan
2. Masih banyak pelaku usaha mikro yang kurang memahami penggunaan teknologi sehingga kegiatan terkait pemanfaatan teknologi digital kurang bisa dipahami mengingat kegiatan tersebut juga memiliki batasan waktu, jadi agar terlihat peningkatannya perlu ditambahkan lagi jumlah kegiatannya
3. Ada beberapa kegiatan baru yang masuk di DPA Perubahan sehingga harus menunggu DPA Perubahan selesai untuk kemudian di laksanakan
4. Ada kegiatan yang dihapus pada DPA Perubahan

Untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja sasaran ditahun berikutnya, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar akan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Memaksimalkan sosialisasi manfaat dalam mengikuti bimbingan teknis dan memaksimalkan pendataan UMKM di seluruh wilayah Kota Makassar
- Mengusulkan tambahan jumlah kegiatan ditahun anggaran selanjutnya terkait peningkatan potensi usaha dan pemanfaatan teknologi digital yang sangat diperlukan oleh usaha mikro

Dokumentasi Digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah

Kegiatan Pelatihan Gratis Digitalisasi UKM dengan Memanfaatkan Fitur Media Sosial dan Google Maps untuk Pengembangan Bisnis bersama Inkubator Kota Makassar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Pelatihan Optimalisasi Digital Marketing bagi UMKM (Angkatan I)



Pelatihan Optimalisasi Digital Marketing bagi UMKM (Angkatan II)



Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional



Pelatihan Pembuatan Roti



CS Reproduksi dengan Cara Ilmiah



CS Reproduksi dengan Cara Ilmiah

Pelatihan Tata Rias



Adapun data pilah gender peserta yang telah mengikuti pelatihan sebagai berikut :

Bidang Pendidikan Penyuluhan Koperasi dan UKM

No	Kegiatan	Jumlah Peserta						Jumlah
		Angkatan 1		Angkatan 2		Angkatan 3		
		P	L	P	L	P	L	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi							
1	Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap laporan keuangan koperasi (Akuntansi Komputerisasi dan Auditing) di lorong wisata	60	43	53	53			209
2	Peningkatan Teknik Penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis akrual bagi koperasi di lorong wisata	60	35	70	26			191
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro							
1	Peningkatan Potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengembangan Pemasaran Produk bagi UMKM di lorong wisata	75	15	81	16			187
2	Peningkatan Teknik Pengelolaan Modal Usaha bagi Usaha Mikro dan Wirausaha Baru di lorong wisata	86	16	93	12			207
	Sub kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro							

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

No	Kegiatan	Jumlah Peserta						Jumlah
		Angkatan 1		Angkatan 2		Angkatan 3		
		P	L	P	L	P	L	
1	Pengembangan Potensi Data Koperasi dan UMKM	70	29	70	29	28	74	300
2	Pelatihan Optimalisasi Digital Marketing bagi UMKM(DAK)	89	18	93	18			218
3	Mengembangkan Potensi Usaha Mikro di lorong wisata	86	20	90	17			213

Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM 2023

Pada tabel data pilah gender diatas jumlah perempuan lebih banyak yang mengikuti kegiatan dibandingkan laki-laki perbandingan tidak terlalu jauh dengan perempuan sehingga tidak ada perbedaan gender jika menghadiri suatu kegiatan.

Bidang UKM

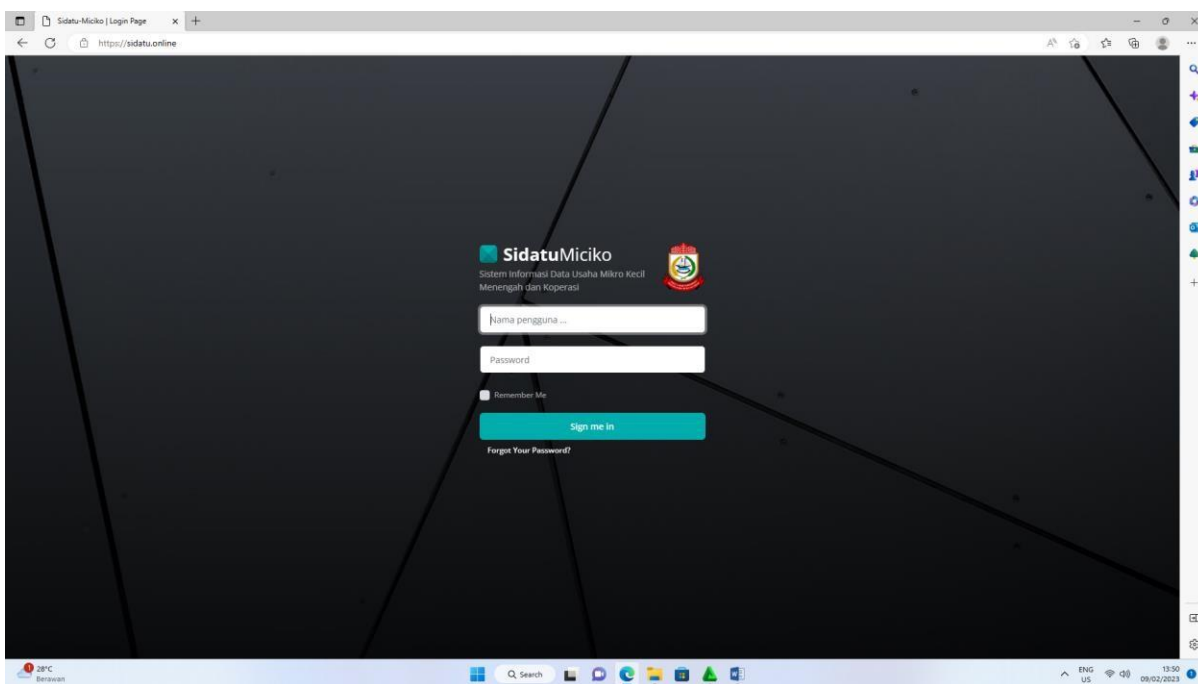
NO.	NAMA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	ANGKATAN I		ANGKATAN II	
			L	P	L	P
1	Pelatihan Pembuatan Roti Angkatan I dan II	6-7 Juni dan 12-13 Juni	6	64	3	67
2	Pembuatan Kue Tradisional I dan II	24-25 Juli dan 17-28	1	69	4	66
3	Pelatihan Tata Rias I dan II	20-21 Juni dan 22-23	0	70	0	70

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

Pada tabel data pilah gender diatas jumlah perempuan lebih banyak yang mengikuti kegiatan dibandingkan laki-laki perbandingan terlalu jauh dengan perempuan karena yang mengikuti pelatihan masak memasak pembuatan roti dan kue tradisional serta pelatihan tata rias lebih banyak diminita perempuan daripada laki-laki.

Adapun Aplikasi Si Datu Miciko database Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dapat dilihat pada Pertumbuhan UMKM di dalam Aplikasi yang selalu tiap tahunnya dilakukan upgrade data dan mengembangkan aplikasi sidatu miciko.

Dokumentasi Si Datu Miciko



Adapun Salah satu misi unggulan pemerintah Wali Kota saat ini yaitu penyediaan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru, untuk mewujudkan visi “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kuat untuk semua” maka dengan ini Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM bermaksud untuk melaksanakan program Inkubator UMKM yang memberikan ruang pada seluruh stakeholder UKM untuk lebih mudah dikelola, dipromosikan dan dikembangkan. Berdasar hal tersebut, maka perlu diawali dengan menyusun Inkubator UMKM yang merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh tenaga-tenaga IT professional, tenaga pemberdayaan masyarakat yang semuanya menjadi bagian dari Pilot Project UMKM Start Up Lorong.

Berikut ini dokumentasi kegiatan yang di inkubator center guna memberikan pelatihan-pelatihan terhadap UMKM mengembangkan usahanya





3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
----------	---

Capaian sasaran *Meningkatnya UKM Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah* yang diukur dengan 2 indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB	BB	100%
Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Persentase(%)	90%	90%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran				100%

Indikator kinerja **pertama** yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Target BB dengan realisasi BB dengan Capaian realisasi sebesar 100% hal ini berdasarkan dengan hasil LHP SAKIP Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar memperoleh nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 79,70 dengan predikat BB (Sangat Baik). Nilai tersebut merupakan Akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi. Kemudian indikator kinerja **kedua** yaitu Penurunan temuan berdasarkan LHP dengan target sebesar 90% dengan realisasi 90% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100% sesuai dengan hasil LHP SAKIP menunjukkan akuntabilitas yang sangat baik yang ditandai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja , memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.676.000	87.376.000	78,95%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.939.260.182	4.883.343.826	82,22%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	147.304.400	137.919.725	93,63%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	860.872.200	137.919.725	85,81%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.398.711.900	998.926.557	71,42%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.830.100	463.940.000	94,14%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.862.800	164.626.586	82,78%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.660.000	242.184.291	83,32%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	970.155.000	947.473.900	97,66%
	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	286.445.000	271.622.000	94,83%
	Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	683.710.000	675.851.900	98,85%
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1.517.948.400	1.425.848.941	93,93%
	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi wilayah keanggotaannya dalam daerah/kabupaten kota	1.517.948.400	1.425.848.941	93,93%
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1.129.513.200	1.104.036.744	97,74%
	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1.129.513.200	1.104.036.744	97,74%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	203.564.000	149.868.600	73,62%
	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten /kota	203.564.000	149.868.600	73,62%
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2.124.216.000	1.655.876.875	77,95%
	Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	2.124.216.000	1.655.876.875	77,95%
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	5.047.816.700	4.397.844.630	87,12%
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan, kemudahan perizinan,penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	5.047.816.700	4.397.844.630	87,12%
8	Program Pengembangan UMKM	10.728.542.572	8.479.190.703	79,03
	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	10.728.542.572	8.479.190.703	79,03

Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM 2023

Realisasi anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan pagu anggaran pokok sebesar Rp.67.404.742.000; (Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Juta

Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp.31.160.933.454; (Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) total penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp.25.877.163.175; (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau 83,04%. Berikut uraian realisasi anggaran pada program dan kegiatan berikut ini :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan realisasi Kegiatan sebagai berikut :
 - a. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan pagu anggaran sebesar Rp.110.676.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.87.376.000; atau 81,76%
 - b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.939.260.182; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.883.343.826; atau 82,22%
 - c. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** dengan pagu anggaran sebesar Rp.147.304.400; dengan realisasi sebesar Rp.137.919.725; atau 93,63%
 - d. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dengan pagu anggaran sebesar Rp.860.872.200; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.738.705.797; atau 85,81%
 - e. **Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.398.711.900; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.998.926.557; atau 71,42%
 - f. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan pagu anggaran sebesar Rp.492.830.100; dengan realisasi anggaran Rp.463.940.000; atau 94,41%
 - g. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan pagu anggaran sebesar Rp.198.862.800; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.164.626.586; atau 82,78%
 - h. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan pagu anggaran sebesar Rp.290.660.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.242.184.291; atau 83,32%
2. **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam** dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. **Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota** dengan pagu anggaran sebesar Rp.286.445.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.271.622.000; atau 94,83%
 - b. **Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan**

dalam daerah kabupaten/kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.683.710.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.675.851.900; atau 98,85%

3. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** dengan realisasi kegiatan sebagai berikut : **Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah/kabupaten kota** dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.517.948.400; dengan realisasi anggaran Rp.1.425.848.941; atau 93,93%
4. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi** dengan realisasi kegiatan sebagai berikut : **Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota** dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.129.513.200; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.104.036.744; atau 97,74%
5. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian** dengan realisasi kegiatan sebagai berikut : **Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota** dengan pagu anggaran sebesar Rp.203.564.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.149.868.600; atau 73,62%
6. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** dengan realisasi kegiatan sebagai berikut : **Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota** dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.124.216.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.655.876.875; atau 77,95%
7. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)** dengan realisasi kegiatan sebagai berikut : **Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan** dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.047.816.700; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.397.844.630; atau 87,12%
8. **Program Pengembangan UMKM** dengan realisasi kegiatan sebagai berikut: **Pengembangan Usaha Makro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil** dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.728.542.572; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.479.190.703; atau 79,03%

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berdaya saing							
	Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Koperasi Sehat	Perse ntase Koper asi aktif 78%	53,59%	69%	2.327.780.000	1.805.745.475	77%	1,11
		Perse ntase Koper asi yang sehat 64%	64,15%	100%	2.647.461.600	2.529.885.685	95%	0,95
	Meningkatnya UKM yang berkualitas	Digita lisasi Usah a Kecil dan Mene ngah 20%	7,69%	38%	2.821.271.000	2.677.694.220	95%	2,5
		Pertu mbuhan Wirau saha baru 10%	13,44%	134%	10.728.542.572	8.479.190.703	79	0,58
	Mewujudkan Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional							

	dan Berkinerja Tinggi							
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja BB	BB	100	9.439.177.582	7.717.022.782	81,76	0,81
		Penurunan Temuan bersarkan LHP 100%	100	100	9.439.177.582	7.717.022.782	81,76	0,81

Pada tabel 3.9 diatas pencapaian kinerja dan anggaran di sasaran 1 (satu) Meningkatkan Lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat dengan target kinerja (1) Persentase koperasi aktif 78% dengan Pencapaian kinerja sebesar 69% dengan target anggaran sebesar Rp.2.327.780.000; dengan realisasi anggaran Rp.1.805.745.475; atau 77% dengan Tingkat efisiensi 1,11%. (2) Persentase Koperasi yang sehat dengan target 64% dengan Pencapaian kinerja sebesar 100% dengan target anggaran sebesar Rp.2.647.461.600; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.529.885.685; atau 95% dengan Tingkat efisiensi sebesar 0,95%.

Sasaran 2 (kedua) Meningkatkan UKM berkualitas dengan indikator kinerja Pertama (1) Digitalisasi usaha kecil dan menengah dengan target 20% dengan pencapaian kinerja sebesar 38% dengan target anggaran sebesar Rp.2.821.271.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.677.694.220; atau 95% dengan Tingkat efisiensi 2,5%. Indikator kedua (2) Pertumbuhan wirausaha baru dengan target sebesar 10% dengan pencapaian kinerja sebesar 134% dengan target anggaran sebesar Rp.10.728.542.572; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.479.190.703; atau 79% dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,58%.

Sasaran 3 (ketiga) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelola keuangan perangkat daerah dengan indikator kinerja pertama (1) Nilai akuntabilitas kinerja dengan target kinerja BB dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan target kinerja sebesar Rp.9.439.177.582; dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.7.717.022.782; atau 81,76% dengan Tingkat efisiensi sebesar 0,81%. Indikator kinerja kedua Penurunan temuan berdasarkan LHP dengan target kinerja sebesar 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan target anggaran sebesar Rp.9.439.177.582; realisasi anggaran sebesar Rp.7.717.022.782; atau 81,76% dengan Tingkat efisiensi 0,81%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100%	9.439.177.582	7.717.022.782	81,76	1,14
		90	90	90%				
		90	90	90%				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	75	75%	110.676.000	87.376.000	78,79	1
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100%	5.939.260.182	4.883.343.826	82,22	1,2
	Administrasi Barang	12	12	100%	147.304.400	137.919.725	94	1,06

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
	Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	12	100%	860.872.200	738.705.797	86	1,16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100%	1.398.711.900	998.926.557	71	1,4
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100%	492.830.100	463.940.000	94	1.06
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100%	198.862.800	164.626.586	83	1,2
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100%	290.660.000	242.184.291	83	1,2
2	Program Pelayana	48,27%	51,72	107%	970.155.000	947.473.900	98	1,09

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
	n Izin Usaha Simpan Pinjam							
	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	264 koperasi	385	145%	286.445.000	271.622.000	95	1,52
	Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	240 koperasi	450	187%	683.710.000	675.851.900	99	1,8

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

No.	Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	13,05%	16,94%	130%	1.517.948.400	1.425.848.941	94	1,3
	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi wilayah keanggotaannya dalam daerah/kabupaten kota	1.230 unit usaha	1.471	119%	1.517.948.400	1.425.848.941	94	1,2
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	64,23%	64,15	99,88%	1.129.513.200	1.104.036.744	98	1,01
	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggot	1000 unit usaha	1008	100%	1.129.513.200	1.104.036.744	98	1,02

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
	aannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota							
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1,62%	0,63%	38,83%	203.564.000	149.868.600	74	0,52
	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	420 unit usaha	201	47,86	203.564.000	149.868.600	74	0,64
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	25,13%	42%	167	2.124.216.000	1.655.876.875	78	2,14
	Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah	940 koperasi	830	88,30%	2.124.216.000	1.655.876.875	78	1,13

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

No.	Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
	kabupaten/kota							
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	520 UMKM	1133	218%	5.047.816.700	4.397.844.630	87	1,3
		89,99%	12,72	14%				
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1000 unit usaha	1.322	132%	5.047.816.700	4.397.844.630	87	1,5
7	Program Pengembangan UMKM	10 UMKM	21 UMKM	210%	10.728.542.572	8.479.190.703	79	2,1
		79%	98,99%	125%				
	Pengembangan	800 unit usaha	703	87,87%	10.728.542.572	8.479.190.703	79	1,1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

No.	Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
	usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil							

Pada tabel 3.10 diatas Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Koa Makassar sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** terdiri dari 8 kegiatan yaitu :
 - a. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan capaian indikator kinerja sebesar 75% dengan capaian anggaran sebesar 78,79% dengan tingkat efisiensi sebesar 1 (efisien)
 - b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% capaian anggaran sebesar 82,22% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,2 (efisien)
 - c. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan capaian anggaran sebesar 94% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,06 (efisien)
 - d. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% capaian anggaran sebesar 86% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,16 (efisien)
 - e. **Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% capaian anggaran sebesar 71% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,4 (efisien)

- f. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% capaian anggaran sebesar 94% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,06 (efisiensi)
 - g. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% capaian anggaran sebesar 83% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,2 (efisiensi)
 - h. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% capaian anggaran sebesar 83% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,2 (efisien)
2. **Program Pelayanan Izin** terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut :
 - a. **Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota** dengan capaian indikator kinerja sebesar 145% capaian anggaran sebesar 95% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,52 (efisien)
 - b. **Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota** dengan capaian indikator kinerja sebesar 187% capaian anggaran sebesar 99% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,8 (efisien)
 3. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** dengan kegiatan **Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi wilayah keanggotaannya dalam daerah/kabupaten kota** dengan capaian indikator kinerja sebesar 119% capaian anggaran sebesar 94% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,2 (efisien)
 4. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi** dengan kegiatan **Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota** dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% capaian anggaran sebesar 98% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,02 (efisien)
 5. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian** dengan kegiatan **Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah**

kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja sebesar 47,86% capaian anggaran sebesar 74% dengan tingkat efisiensi sebesar 0,64 (inefisien)

6. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** dengan kegiatan **Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota** dengan capaian indikator kinerja sebesar 88,30% capaian anggaran sebesar 78% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,13(efisien)
7. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)** dengan kegiatan **Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan, kemudahan perizinan,penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan** dengan capaian indikator kinerja sebesar 132% capaian anggaran sebesar 87% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,5 (efisien)
8. **Program Pengembangan UMKM** dengan kegiatan **Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil** dengan capaian indikator kinerja sebesar 87,87% capaian anggaran sebesar 79% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,1 (efisien)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan, 3 (Tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

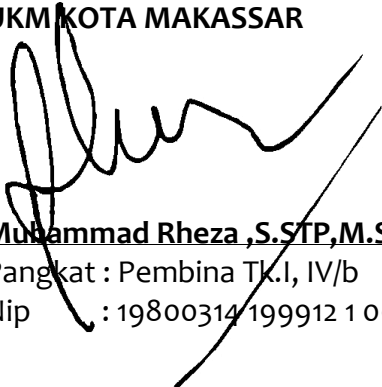
- Sasaran 1 (satu) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 84% (kategori Tinggi)
- Sasaran 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 86% (kategori Tinggi)
- Sasaran 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 86% (kategori Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 sebelum Perubahan sebesar Rp.67.404.742.000; dan Anggaran setelah perubahan sebesar Rp.31.160.933.454; sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.25.877.163.175; dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 83,04% (kategori Tinggi).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Makassar.

Makassar , 26 Januari 2024
**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM KOTA MAKASSAR**



Muhammad Rheza ,S.STP,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
Nip : 19800314/199912 1 002

LAMP IRAN

LAMPIRAN 1.1 PETA JABATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

**KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA
KECIL DAN
MENENGAH**
Kelas 14

JABATAN FUNSIONAL				
Jabatan	Kls	B	K	S
- JF. Pengawas Koperasi Ahli Madya	12	0	1	-1
- JF. Pengawas Koperasi Ahli Muda	10	3	6	-3
- JF. Pengawas Koperasi Ahli Pertama	8	2	2	0

SEKRETARIS
Kelas 12

**KEPALA SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN PELAPORAN**
Kelas 9

Jabatan	Kls	B	K	S
- Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	5	-1
- Pengolah Data dan Informasi	6	0	0	0
- Pengadministrasi Perkantoran	5	0	0	0

**KEPALA SUBBAGIAN
KEUANGAN**
Kelas 9

Jabatan	Kls	B	K	S
- Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	3	0
- Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
- Pengadministrasi Perkantoran	5	0	0	0

**KEPALA SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
Kelas 9

Jabatan	Kls	B	K	S
- Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	2	-2
- Pengolah Data dan Informasi	6	2	3	-1
- Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0
- Penata Layanan Operasional	5	0	0	0
- Pengemudi	3	0	1	-1

**KEPALA BIDANG
KELEMBAGAAN KOPERASI**
Kelas 11

Jabatan	Kls	B	K	S
- Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
- Pengolah Data dan Informasi	6	1	3	-2
- Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	-2

**KEPALA BIDANG
USAHA KECIL DAN MENENGAH**
Kelas 11

Jabatan	Kls	B	K	S
- Penelaah Teknis Kebijakan	7	6	6	0
- Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
- Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

**KEPALA BIDANG
PEMBIAYAAN DAN
SIMPAN PINJAM**
Kelas 11

Jabatan	Kls	B	K	S
- Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	3	-1
- Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
- Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	-2

**KEPALA BIDANG
PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**
Kelas 11

Jabatan	Kls	B	K	S
- Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	3	-1
- Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
- Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	-2

**LAMPIRAN 2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR**

NO	STATUS STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Aktif	78%
		Persentasi Koperasi Simpan Pinjam yang sehat	64%
2	Meningkatnya UKM yang berkualitas	Digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah	20%
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	10%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase koperasi yang mendapatkan penignkatan kapasitas	BB
		Jumlah UKM mendapat peningkatan kapasitas SDM	100%

TAHUN 2023

No	Sasaran		Target		Realisasi	Prosentase Pencapaian Target	Rata-rata	Ket
	Uraian	Indikator kinerja	Satuan	Rencana Tingk. Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Aktif	%	78	53,59%	69%		Koperasi dikatakan aktif adalah koperasi yang melaksanakan RAT, jumlah koperasi aktif 1.059 koperasi dan jumlah keseluruhan koperasi 1.976 (Sumber data dari ODS)
		persentase koperasi simpan pinjam yang sehat	%	64	64,15%	100%		Jumlah KSP/USP yang sudah dinilai kesehatannya 102 koperasi dari jumlah seluruh KSP/USP 159 koperasi (sumber data bid.pembiayaan)
		<i>Rata-rata Capaian sasaran</i>					84%	
2	Meningkatnya UKM yang berkualitas	Digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah	%	20	7,69%	38%		Jumlah data inkubasi 2031 dibagi jumlah usaha mikro 26,393 (sumber data inkubator center dan Sidatu Miciko)
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	10	13,44%	134%		Jumlah nilai akhir pertumbuhan wirausaha baru 3.435 dan jumlah nilai awal pertumbuhan wirausaha baru 3.028 (sumber data bid.UKM)
		<i>Rata-rata Capaian sasaran</i>					86%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	nilai	BB	BB	100		sesuai dengan hasil LHP SAKIP 79,70 dengan predikat Sangat Baik
		Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	%	100	100	100		sesuai dengan hasil LHP SAKIP
		<i>Rata-rata Capaian sasaran</i>					100%	
		<i>Jumlah Rata-rata Capaian sasaran</i>					90%	

LAMPIRAN 3.1.1
LAPORAN KERAGAAN KOPERASI
KOTA MAKASSAR 2023

No	Kelompok Koperasi	Koperasi (Unit)			Anggota (Orang)			RAT (Unit)	Manajer (Orang)			Karyawan			Modal Sendiri	Modal Luar	Volume Usaha	SHU
		JML	Akti	Tdk	JML	L	P		JML	L	P	JM	L	P				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	KUD	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kop. Pertanian	10	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kop. Perkebunan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kop. Peternakan	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kop. Nelayan	14	8	6	1.010	409	601	1	5	2	3	123	87	36	7.026.898.564	0	5.476.234.770	-421.394.468
6	Kopinkra	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Koppontren	12	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kopkar	198	94	104	7.123	4.646	2.477	25	25	14	11	124	66	58	68.241.031.575	149.598.145.559	156.218.699.956	12.444.901.958
9	Kop. Angkatan Darat	48	42	6	948	924	24	4	3	3	0	5	4	1	4.762.462.228	427.892.815	1.377.506.704	391.173.522
10	Kop. Angkatan Laut	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kop. Angkatan Udara	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kop. Kepolisian	13	5	8	1.957	1.911	46	3	0	0	0	10	7	3	5.908.406.998	893.247.649	4.997.843.699	675.520.146
13	Kop. Serba Usaha	495	193	302	2.595	1.303	1.292	7	6	6	0	45	33	12	2.759.869.416	1.878.416.165	13.246.621.238	509.447.114
14	Kop. Pasar	12	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kop. Simpan Pinjam	87	74	13	42.660	22.978	19.682	19	37	34	3	769	468	301	46.357.097.892	14.288.374.961	95.023.320.918	2.697.087.265
16	Kop. Angkutan Darat	9	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kop. Wisata	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kop. Telkom	1	1	0	513	359	154	1	0	0	0	5	3	2	1.050.721.012	833.852.765	519.314.645	34.639.334
19	Kop. Perumahan	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kop. Pegawai Negeri (KPR	228	121	107	5.670	2.592	3.078	13	8	3	5	164	67	97	72.631.324.183	148.511.291.938	63.407.120.498	9.146.006.285
21	Koperasi Asuransi Indonesi	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kop. Wanita	49	24	25	77	15	62	1	0	0	0	0	0	0	198.198.303	173.157.542	85.700.000	11.004.000
23	Kop. Profesi	2	1	1	11	9	2	1	1	1	0	1	1	0	32.195.000	10.682.500	40.300.000	4.250.000
24	Kop. Veteran	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kop. Wredatama	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kop. Pepabri	7	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kop. Mahasiswa	12	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kop. Pemuda	8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kop. Pedagang Kaki Lima	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kop. Lainnya	717	432	285	138	115	23	1	1	1	0	1	0	1	1.152.807.150	37.382.600	4.609.154.102	107.885.311
31	Kop. Simpan Pinjam dan P	14	14	0	27	17	10	1	0	0	0	7	5	2	27.225.000	0	29.000.000	1.383.650
32	Kop. Tenaga Kerja Bongka	1	1	0	732	731	1	1	2	2	0	14	13	1	1.522.693.280	198.056.569	530.850.000	56.568.124
Jumlah		1.976	1.059	917	63.461	36.009	27.452	78	88	66	22	1.268	754	514	211.670.930.601	316.850.501.063	345.561.666.530	25.658.472.241

LAMPIRAN 3.1.2 KOPERASI SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT KOPERASI	KRITERIA PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI				KET.
			SEHAT	CUKUP SEHAT	KURANG SEHAT	TIDAK SEHAT	
1	KPN MEKAR SMP NEG. 17 MAKASSAR	JL. TAMANGAPA RAYA V / 5 MAKASSAR		CUKUP SEHAT	-	-	
2	KPN SEMANGAT 45	JL. TIMOR NO. 79 MAKASSAR		CUKUP SEHAT	-	-	
3	KPN TUNAS HARAPAN PGRI UJUNG TANAH	JL. SERDAKO USMAN ALI NO. 4	-	CUKUP SEHAT	-	-	
4	KPN "BAHARI" PIP MAKASSAR	JL. TENTARA PELAJAR NO. 173 MAKASSAR	SEHAT		-	-	
5	KOP. SALSABILA ARTHA MANDIRI	JL. TANJUNG PALLETE NO. 32 TAHUN	-	CUKUP SEHAT	-	-	
6	KPN "AMANAH" MAN 2 KOTA MAKASSAR	JL. SULTAN ALAUDDIN MAKASSAR	SEHAT	-	-	-	
7	KPN BAJI ARENG SMA NEGERI 3 MAKASSAR	JL. BAJI ARENG NO. 18 MAKASSAR	-	CUKUP SEHAT	-	-	
8	KPN RSUD LABUANG BAJI PROV. SUL-SEL	JL. DR. RATULANGI MAKASSAR	SEHAT	-	-	-	
9	KOP. AKBAR SMA NEGERI 21 MAKASSAR	JL. TAMALANREA RAYA (BTP) MAKASSAR	-	CUKUP SEHAT	-	-	
10	KSP. MAKMUR MANDIRI	JL. TODDOPULI RAYA MAKASSAR	SEHAT	-	-	-	
11	KPRI BLPT SMK NEGERI 10 MAKASSAR	JL. BONTO LANGKASA NO. 28 A MAKASSAR	SEHAT	-	-	-	
12	KSU SYARIAH BMT SINERGI KARYA	JL. ASRAMA HAJI SUDIANG NO. 3 MAKASSAR	-	CUKUP SEHAT	-	-	
13	KOP. POLITEKNIK AKADEMI TEKNIK INDUSTRI "A"	JL. SUNU NO. 220 MAKASSAR	SEHAT	-	-	-	
14	KPN DAYA MAKMUR "BKN" MAKASSAR	JL. PACCERAKKANG NO. 3 MAKASSAR	SEHAT	-	-	-	
15	KPN " ARWANA" KKP KELAS I MAKASSAR	JL. HATTA NO. 3 BUTUNG MAKASSAR	-	CUKUP SEHAT	-	-	
16	KSP. SATYADANA MAKASSAR	JL. P. KEMERDEKAAN KM. 12 NO. 162 MAKASSAR	SEHAT	-	-	-	
17	KPN. UTAMA DIKBUD KEC. BIRINGKANAYA	JL. KANTOR PUSAT NIAGA DAYA	-	CUKUP SEHAT	-	-	
18	KOP. CREDIT UNION (CU) MEKAR KASIH	JL. PELITA RAYA BLOK A 24/5 MAKASSAR	SEHAT	-	-	-	
19	PRIMKOP KARTIKA HASANUDDIN KARYA DHAR	JL. URIP SUMOHARDJO KM. 7 MAKASSAR	SEHAT	-	-	-	
20	KPN PERINTIS	JL. P. KEMERDEKAAN KM. 10 TAMALANREA	SEHAT	-	-	-	
21	KPN MEKAR SMP NEGERI 17	JL. TAMANGAPA RAYA V NO 5	-	CUKUP SEHAT	-	-	
22	KPN TUNAS HARAPAN PGRI UJUNG TANAH	JL. SERDAKO USMAN ALI	SEHAT	-	-	-	
23	KPN SEJAHTERA SMK NEGERI 1 MAKASSAR	JL. A. MANGERANGI NO. 38	-	CUKUP SEHAT	-	-	
24	KPN BINA KARYA SMP NEGERI 24 MAKASSAR	JL. BAJI GAU NO. 41	SEHAT	-	-	-	
25	KSU BMT SINERGI KARYA	JL. ASRAMA HAJI	-	CUKUP SEHAT	-	-	
26	KSPPS BAKTI HURIA	JL. MALLENGKERI	-	CUKUP SEHAT	-	-	
27	KPN SIPAKAINGA SMA NEG 8	JL. ANDI MANGERANGI 2	-	CUKUP SEHAT	-	-	
28	KSP MAKMUR MANDIRI	JL. TODDOPULI RAYA TIMUR	SEHAT	-	-	-	
29	KPN "HUMANIORA" SMP NEGERI 11 MAKASSAR	JL. KAPASA BARU	-	CUKUP SEHAT	-	-	
30	KPN UTAMA GURU-GURU/ TAMALANREA BIRINGKANAYA	RUKO PASAR GROSIR DAYA BLOK RD 06	SEHAT	-	-	-	
31	KSP BALO'TA	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN	-	CUKUP SEHAT	-	-	
32	KOPERASI AKBAR SMA NEGERI 21 MAKASSAR	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN	-	CUKUP SEHAT	-	-	
33	KOPKAR SIPAKALEBBI PT. TELKOM MAKASSAR	JL. AP. PETTARANI NO. 02	-	CUKUP SEHAT	-	-	

34	KPRI BAJI ARENG SMA NEGERI 3 MAKASSAR	JL. BAJI ARENG NO. 18	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
35	KOPERASI MAMMINASAE DWP PROV. SULSEL	JL. A. MAPPANYUKKI NO.25	SEHAT	-	-	-	-
36	KOPERASI PARAİKATTE	JL SUNU III BLOK H NO.7	SEHAT	-	-	-	-
37	KOPERASI "SUKMA" KARYAWAN SMK 7	JL. INCE NURDIN NO.35	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
38	KOPERASI "SINAR JAYA AMANAH"	JL. ABD. KUDDUS NO. 46 BAROMBONG	SEHAT	-	-	-	-
39	KOPERASI ALUMNI MANDIRI MAKASSAR	JL. RA KARTINI NO. 19	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
40	KPN SMA 4 MAKASSAR	JL. CAKALANG	SEHAT	-	-	-	-
41	KOPKAR SIPORENUU PT. TELKOM	JL. AP. PETTARANI NO. 02	SEHAT	-	-	-	-
42	KPN SALEWANGANG DINKES MAKASSAR	JL. TEDUH BERSINAR	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
43	KOPKAR KANTOR POS	JL. SLAMET RIYADI	SEHAT	-	-	-	-
44	KOPONTREN UMMUL MUKMININ	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.17	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
45	KOPKAR UNIVERSITAS BOSOWA	JL URIP SUMIHARJO KM. 4	SEHAT	-	-	-	-
46	KPN NUR AFIAH RSWs MAKASSAR	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
47	PRIMKOPPOL POLRESTABES MAKASSAR	JL. JENDRAL AHMAD YANI	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
48	KOPERASI SALSABILA ARTHA MANDIRI	JL. TANJUNG PALETTE NO. 32	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
49	KSP SATYADANA	JL. MACCINI BARU	SEHAT	-	-	-	-
50	KPN SMP NEG. 5	JL. SUMBA	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
51	KOPENPOS	JL. RAPPOCINI	SEHAT	-	-	-	-
52	KOPKAR KARTIKA	JL. URIP SUMIHARJO	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
53	KPN SMP 18	KOMP. HARTACO	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
54	KPN SMP NEG. 25 MAKASSAR	JL. SANRANGAN	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
55	KSP TUNAS USAHA JAYA	JL. RAYA PENDIDIKAN	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
56	PRIMKOPPAL LANTAMAL VI	JL. YOS SUDARSO	SEHAT	-	-	-	-
57	KSP BERKAT	JL. SULTAN ALAUDDIN	SEHAT	-	-	-	-
58	KOPPAS HIDAYAT	JL. P. NIAGA DAYA	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
59	KOPKAR TIRTA SEJAHTERA PDAM	JL. DR. RATULANGI	SEHAT	-	-	-	-
60	KSP MEDIA FAJAR	JL. RACING CENTRE	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
61	KPN BAJI ARTHA KEMENKEU	JL. URIP SUMIHARJO	SEHAT	-	-	-	-
62	KPN ARMINA RS HAJI	JL. DAENG NGEPE	SEHAT	-	-	-	-
63	KOP. PENSIUNAN TELKOM SIPORIO	JL. AP. PETTARANI	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
64	KPN MAN 1 ASSA'ADAH	JL. TALASSALAPANG	SEHAT	-	-	-	-
65	KOPKAR PT. INDOFOOD	JL. KIMA X	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
66	KPN BLKI	JL. TAMAN MAKAM PAHLAWAN	SEHAT	-	-	-	-
67	KOPKAR NUSANTARA PTPN XIV	JL. URIP SUMIHARJO	SEHAT	-	-	-	-
68	KOPKAR ATMAJAYA	JL. TANJUNG BUNGA	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
69	KPN MITRA KARYA HUSADA	JL. AP. PETTARANI	SEHAT	-	-	-	-
70	KPN MEKAR SMP NEGERI 29	JL. MAPPANYUKKI	-	CUKUP SEHAT	-	-	-

71	KOPERASI INSAN PERIKANAN	JL. SABUTUNG	SEHAT		-	-	
72	KOP. TKBM KARYA TULUS	JL. NUSANTARA	-	CUKUP SEHAT	-	-	
73	KOPKAR GATRA PELITA PLN	JL. JEND. HERTASNING	SEHAT	-	-	-	
74	KOPKAR ANTAM	JL. DR. RATULANGI	-	CUKUP SEHAT	-	-	
75	KSU BINA DUTA	JL. SULAWESI	SEHAT	-	-	-	
76	KPN SMP NEGERI 9	JL.IR.SUTAMI	SEHAT	-	-	-	
77	KOP NELAYAN HARAPAN UTAMA PRIBUMI	JL. AP. PETTARANI NO 11B	-	CUKUP SEHAT	-	-	
78	KPN BANGKIT SMP NEGERI 4 MKS	JL. PONGTIKU	SEHAT	-	-	-	
79	KPN BATARA GURU LPMP	JL. AP PETTARANI	-	CUKUP SEHAT	-	-	
80	KPN DISTRIK NAVIGASI	JL. SABUTUNG	SEHAT	-	-	-	
81	KOP MAJELIS TAKLIM RAODARATUL JANNAH	JL. SULTAN ALAUDDIN (BPH)	SEHAT	-	-	-	
82	KPN AMANAH MAN 2 MODEL	JL. AP. PETTARANI	-	CUKUP SEHAT	-	-	
83	KOPKAR PT. MARUKI	JL. KIMA V	SEHAT	-	-	-	
84	KPN PENGAYOMAN LAPAS KLS I	JL. SULTAN ALAUDDIN	-	CUKUP SEHAT	-	-	
85	KPN UNM	JL. AP. PETTARANI	SEHAT	-	-	-	
86	PRIMKOPAU KOSEK II	JL. P. KEMERDEKAAN	-	CUKUP SEHAT	-	-	
87	KPN BAPAS PENGAYOMAN	JL. AP. PETTARANI	SEHAT	-	-	-	
88	KPN RUTAN KLS I MAKASSAR	JL. RUTAN	-	CUKUP SEHAT	-	-	
89	KPN HARAPAN JAYA SMA NEG. 14 MKS	JL. BAJI MINASA	SEHAT	-	-	-	
90	KPN SMA NEG. 11 MAKASSAR	JL. ANDI MAPPAODDANG	-	CUKUP SEHAT	-	-	
91	KPN SUBUR DKP PROV. SUL -SEL	JL. RATULANGI	-	CUKUP SEHAT	-	-	
92	KPN TAT TWAM ASI DINSOS SUL - SEL	JL. AP PETTARANI NO. 59	-	CUKUP SEHAT	-	-	
93	KPN AL - MUAWANAH UIN ALAUDDIN	JL. SAMATA	-	CUKUP SEHAT	-	-	
94	KPN SMP NEG. 37 MAKASSAR	JL. GALANGAN KAPAL	SEHAT	-	-	-	
95	KSP MITRA SEJAHTERA PERDANA	JL. MUH. JUFRI IV NO. 36	SEHAT	-	-	-	
96	KOP PATRIA JUSTICIA	JL. AP. PETTARANI	-	CUKUP SEHAT	-	-	
97	KPN BANDAR MAKASSAR BARU	JL. SUKARNO HATTA	SEHAT	-	-	-	
98	KPN MEKAR MELATI DPRD PROV. SUL - SEL	JL. URIP SUMOHARJO	-	CUKUP SEHAT	-	-	
99	KPN SMK NEG. 3 MAKASSAR	JL. BONTO MENE	SEHAT	-	-	-	
100	KPN SEGAR POLTEKPEL BAROMBONG	JL. PERMANDIAN ALAM	SEHAT	-	-	-	
101	KSP CELEBES PUTRA MANDIRI	JL. Todopuli	-	CUKUP SEHAT	-	-	-
102	KSP FAUZAN	JL. Abubakar Lambogo	-	CUKUP SEHAT	-	-	-

Mengetahui,
**KABID PEMBIAYAAN DAN SIMPAN PINJAM
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR**

ADE ISMAR GOBEL, S.STP. M.SI
NIP. 19790315 199810 1 001

**MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2023**

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR (PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH SD. TW IV SEBESAR 83,04%)

KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	31.160.933.454,00	25.877.163.175,00	83,04	83,04	5.283.770.279,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.439.177.582,00	7.717.022.782,00	81,76	81,76	1.722.154.800,00	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.676.000,00	87.376.000,00	78,95	78,95	23.300.000,00	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.682.000,00	61.170.000,00	91,73	91,73	5.512.000,00	
2.17.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	634.000,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	
2.17.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	498.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	
2.17.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	
2.17.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	570.000,00	47,50	47,50	630.000,00	
2.17.01.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.01.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.01.2.01.01.5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.01.2.01.01.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9.000.000,00	7.500.000,00	83,33	83,33	1.500.000,00	
2.17.01.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.01.2.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.563.000,00	6.599.000,00	87,25	87,25	964.000,00	
2.17.01.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.295.000,00	1.905.000,00	83,01	83,01	390.000,00	
2.17.01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	512.000,00	504.000,00	98,44	98,44	8.000,00	
2.17.01.2.01.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.756.000,00	1.220.000,00	69,48	69,48	536.000,00	
2.17.01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	570.000,00	95,00	95,00	30.000,00	
2.17.01.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.01.2.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.435.000,00	2.970.000,00	39,95	39,95	4.465.000,00	
2.17.01.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.295.000,00	0,00	0,00	0,00	2.295.000,00	
2.17.01.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	
2.17.01.2.01.03.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.756.000,00	0,00	0,00	0,00	1.756.000,00	

KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.01.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	570.000,00	95,00	95,00	30.000,00	
2.17.01.2.01.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.01.2.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.621.000,00	5.436.000,00	71,33	71,33	2.185.000,00	
2.17.01.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.481.000,00	2.088.000,00	84,16	84,16	393.000,00	
2.17.01.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	384.000,00	378.000,00	98,44	98,44	6.000,00	
2.17.01.2.01.04.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.756.000,00	0,00	0,00	0,00	1.756.000,00	
2.17.01.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	570.000,00	95,00	95,00	30.000,00	
2.17.01.2.01.04.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.01.2.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.527.000,00	3.868.000,00	51,39	51,39	3.659.000,00	
2.17.01.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.295.000,00	0,00	0,00	0,00	2.295.000,00	
2.17.01.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	384.000,00	378.000,00	98,44	98,44	6.000,00	
2.17.01.2.01.05.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.848.000,00	520.000,00	28,14	28,14	1.328.000,00	
2.17.01.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	570.000,00	95,00	95,00	30.000,00	
2.17.01.2.01.05.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.01.2.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.096.000,00	2.325.000,00	32,76	32,76	4.771.000,00	
2.17.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	874.000,00	508.000,00	58,12	58,12	366.000,00	
2.17.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	434.000,00	427.000,00	98,39	98,39	7.000,00	
2.17.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.188.000,00	820.000,00	37,48	37,48	1.368.000,00	
2.17.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	570.000,00	47,50	47,50	630.000,00	
2.17.01.2.01.06.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
2.17.01.2.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.752.000,00	5.008.000,00	74,17	74,17	1.744.000,00	
2.17.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
2.17.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	384.000,00	378.000,00	98,44	98,44	6.000,00	
2.17.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.848.000,00	520.000,00	28,14	28,14	1.328.000,00	
2.17.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.710.000,00	95,00	95,00	90.000,00	
2.17.01.2.01.06.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	100,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.939.260.182,00	4.883.343.826,00	82,22	82,22	1.055.916.356,00	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	5.432.202.682,00	4.395.564.826,00	80,92	80,92	1.036.637.856,00	
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.185.943.512,00	2.018.698.500,00	92,35	92,35	167.245.012,00	
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	195.428.236,00	173.004.666,00	88,53	88,53	22.423.570,00	
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	133.070.000,00	127.190.000,00	95,58	95,58	5.880.000,00	
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	56.400.000,00	28.620.000,00	50,74	50,74	27.780.000,00	
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	67.322.000,00	61.740.000,00	91,71	91,71	5.582.000,00	
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	107.517.060,00	97.694.580,00	90,86	90,86	9.822.480,00	
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	31.144.850,00	14.713.597,00	47,24	47,24	16.431.253,00	
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.000,00	25.231,00	70,09	70,09	10.769,00	
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	232.637.000,00	135.690.057,00	58,33	58,33	96.946.943,00	
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.959.000,00	4.188.818,00	30,01	30,01	9.770.182,00	
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	41.875.000,00	12.566.562,00	30,01	30,01	29.308.438,00	
2.17.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.323.670.024,00	1.680.392.815,00	72,32	72,32	643.277.209,00	
2.17.01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	43.200.000,00	41.040.000,00	95,00	95,00	2.160.000,00	
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	352.660.000,00	347.760.000	98,61	98,61	4.900.000,00	
2.17.01.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	329.260.000,00	324.360.000,00	98,51	98,51	4.900.000,00	
2.17.01.2.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.01.2.02.02.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	139.741.500,00	132.840.000,00	95,06	95,06	6.901.500,00	
2.17.01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	
2.17.01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	491.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	
2.17.01.2.02.03.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.465.500,00	0,00	0,00	0,00	4.465.500,00	
2.17.01.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	6.840.000,00	95,00	95,00	360.000,00	
2.17.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	126.000.000,00	126.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.145.500,00	1.140.000,00	36,24	36,24	2.005.500,00	
2.17.01.2.02.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	
2.17.01.2.02.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	
2.17.01.2.02.04.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.488.500,00	0,00	0,00	0,00	1.488.500,00	
2.17.01.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.140.000,00	95,00	95,00	60.000,00	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.535.000,00	1.208.000,00	47,65	47,65	1.327.000,00	
2.17.01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	856.000,00	456.000,00	53,27	53,27	400.000,00	
2.17.01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	185.000,00	182.000,00	98,38	98,38	3.000,00	

KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.01.2.02.05.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	
2.17.01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	570.000,00	47,50	47,50	630.000,00	
2.17.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.126.500,00	1.773.000,00	56,71	56,71	1.353.500,00	
2.17.01.2.02.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
2.17.01.2.02.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	192.000,00	189.000,00	98,44	98,44	3.000,00	
2.17.01.2.02.06.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.658.500,00	1.394.000,00	84,05	84,05	264.500,00	
2.17.01.2.02.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	190.000,00	15,83	15,83	1.010.000,00	
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.956.500,00	1.814.000,00	61,36	61,36	1.142.500,00	
2.17.01.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
2.17.01.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	
2.17.01.2.02.07.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.488.500,00	1.244.000,00	83,57	83,57	244.500,00	
2.17.01.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	570.000,00	47,50	47,50	630.000,00	
2.17.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.892.500,00	1.244.000,00	43,01	43,01	1.648.500,00	
2.17.01.2.02.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
2.17.01.2.02.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	
2.17.01.2.02.08.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.488.500,00	1.244.000,00	83,57	83,57	244.500,00	
2.17.01.2.02.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	147.304.400,00	137.919.725,00	93,63	93,63	9.384.675,00	
2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	147.304.400,00	137.919.725,00	93,63	93,63	9.384.675,00	
2.17.01.2.03.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.912.000,00	1.258.000,00	43,20	43,20	1.654.000,00	
2.17.01.2.03.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.750.000,00	1.725.000,00	98,57	98,57	25.000,00	
2.17.01.2.03.06.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.866.000,00	2.230.000,00	57,68	57,68	1.636.000,00	
2.17.01.2.03.06.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	126.000.000,00	121.500.000,00	96,43	96,43	4.500.000,00	
2.17.01.2.03.06.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.096.000,00	10.569.525,00	87,38	87,38	1.526.475,00	
2.17.01.2.03.06.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	302.400,00	283.200,00	93,65	93,65	19.200,00	
2.17.01.2.03.06.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	378.000,00	354.000,00	93,65	93,65	24.000,00	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	860.872.200,00	738.705.797,00	85,81	80,18	122.166.403,00	
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	54.750.000,00	52.460.000,00	95,82	95,82	2.290.000,00	
2.17.01.2.05.02.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	54.750.000,00	52.460.000,00	95,82	95,82	2.290.000,00	

KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	171.622.200,00	167.482.617,00	97,59	69,34	4.139.583,00	
2.17.01.2.05.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.600.000,00	1.575.000,00	98,44	98,44	25.000,00	
2.17.01.2.05.03.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.071.000,00	380.000,00	35,48	35,48	691.000,00	
2.17.01.2.05.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	108.000.000,00	106.500.000,00	98,61	98,61	1.500.000,00	
2.17.01.2.05.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja jasa tenaga operator komputer	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.01.2.05.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran jaminan kesehatan bagi Non ASN	10.368.000,00	10.005.817,00	96,51	96,51	362.183,00	
2.17.01.2.05.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran jaminan kecelakaan bagi Non ASN	259.200,00	243.600,00	93,98	93,98	15.600,00	
2.17.01.2.05.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran jaminan kematian bagi Non ASN	324.000,00	304.500,00	93,98	93,98	19.500,00	
2.17.01.2.05.03.5.1.02.02.09.0013	Belanja jasa konsultansi berorientasi layanan jasa konsultansi manajemen	50.000.000,00	48.473.700,00	96,95	96,95	1.526.300,00	
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	634.500.000,00	518.763.180,00	81,76	81,76	115.736.820,00	
2.17.01.2.05.09.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	499.500.000,00	429.489.000,00	85,98	85,98	70.011.000,00	
2.17.01.2.05.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	135.000.000,00	89.274.180,00	66,13	66,13	45.725.820,00	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.398.711.900,00	998.926.557	71,42	71,42	399.785.343,00	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.062.000,00	5.800.000,00	95,68	95,68	262.000,00	
2.17.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik	6.062.000,00	5.800.000,00	95,68	95,68	262.000,00	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	372.204.280,00	230.614.420,00	61,96	61,96	141.589.860,00	
2.17.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
2.17.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	9.953.000,00	9.542.700,00	95,88	95,88	410.300,00	
2.17.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	38.621.000,00	36.580.000,00	94,72	94,72	2.041.000,00	
2.17.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	153.888.000,00	101.605.500,00	66,03	66,03	52.282.500,00	
2.17.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	8.770.000,00	4.484.500,00	51,13	51,13	4.285.500,00	
2.17.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik	4.288.000,00	0,00	0,00	0,00	4.288.000,00	
2.17.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	5.891.000,00	4.653.000,00	78,98	78,98	1.238.000,00	
2.17.01.2.06.02.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.382.000,00	9.845.000,00	94,83	94,83	537.000,00	
2.17.01.2.06.02.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	20.336.280,00	18.000.000,00	88,51	88,51	2.336.280,00	
2.17.01.2.06.02.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.01.2.06.02.5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	120.000.000,00	45.903.720,00	38,25	38,25	74.096.280,00	
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	83.480.700,00	63.480.000,00	76,04	76,04	20.000.700,00	
2.17.01.2.06.03.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan Isi Tabung Gas	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.000.000,00	6.500.000,00	92,86	92,86	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.01.2.06.03.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal alat penyimpan perlengkapan kantor	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.01.2.06.03.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal alat Pendingin	9.630.700,00	9.050.000,00	93,97	93,97	580.700,00	
2.17.01.2.06.03.5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	51.250.000,00	34.100.000,00	66,54	66,54	17.150.000,00	
2.17.01.2.06.03.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.600.000,00	13.830.000,00	88,65	88,65	1.770.000,00	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.763.920,00	119.566.100,00	92,14	92,14	10.197.820,00	
2.17.01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja natura dan pakan-natura	41.263.920,00	37.966.100,00	92,01	92,01	3.297.820,00	
2.17.01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja makanan dan minuman rapat	52.500.000,00	45.600.000,00	86,86	86,86	6.900.000,00	
2.17.01.2.06.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.475.000,00	42.055.000,00	75,81	75,81	13.420.000,00	
2.17.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	55.475.000,00	42.055.000,00	75,81	75,81	13.420.000,00	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.420.000,00	5.527.000,00	20,16	20,16	21.893.000,00	
2.17.01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	27.420.000,00	5.527.000,00	20,16	20,16	21.893.000,00	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	456.000.000,00	271.334.037,00	59,50	59,50	184.665.963,00	
2.17.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	456.000.000,00	271.334.037,00	59,50	59,50	184.665.963,00	
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	268.306.000,00	260.550.000,00	97,11	97,11	7.756.000,00	
2.17.01.2.06.11.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan Sekretariat tim pelaksana kegiatan	40.800.000,00	40.800.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.01.2.06.11.5.1.02.02.01.0016	Belanja jasa tenaga tim penanganan prasarana dan sarana umum	2.506.000,00	0,00	0,00	0,00	2.506.000,00	
2.17.01.2.06.11.5.1.02.02.01.0055	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan	225.000.000,00	219.750.000,00	97,67	97,67	5.250.000,00	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	492.830.100,00	463.940.000,00	94,14	94,14	28.890.100,00	
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	492.830.100,00	463.940.000,00	94,14	94,14	28.890.100,00	
2.17.01.2.07.06.5.2.02.05.02.0004	Belanja modal alat pendingin	9.230.000,00	9.150.000,00	99,13	99,13	80.000,00	
2.17.01.2.07.06.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	150.724.000,00	126.200.000,00	83,73	83,73	24.524.000,00	
2.17.01.2.07.06.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.01.2.07.06.5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	48.045.400,00	44.680.000,00	93,00	93,00	3.365.400,00	
2.17.01.2.07.06.5.2.02.10.01.0002	Belanja modal personal computer	256.440.000,00	256.440.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.01.2.07.06.5.2.02.10.02.0003	Belanja modal peralatan personal computer	28.390.700,00	27.470.000,00	96,76	96,76	920.700,00	

KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.862.800,00	164.626.586,00	82,78	82,78	34.236.214,00	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	186.862.800,00	155.432.411,00	83,18	83,18	31.430.389,00	
2.17.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	6.258.000,00	1.013.000,00	16,19	16,19	5.245.000,00	
2.17.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1.110.000,00	1.095.000,00	98,65	98,65	15.000,00	
2.17.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	1.068.000,00	0,00	0,00	0,00	1.068.000,00	
2.17.01.2.08.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja jasa tenaga administrasi	162.000.000,00	139.500.000,00	86,11	86,11	22.500.000,00	
2.17.01.2.08.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran jaminan kesehatan bagi Non ASN	15.552.000,00	13.106.211,00	84,27	84,27	2.445.789,00	
2.17.01.2.08.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran jaminan kecelakaan bagi Non ASN	388.800,00	319.200,00	82,10	82,10	69.600,00	
2.17.01.2.08.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran jaminan kematian bagi Non ASN	486.000,00	399.000,00	82,10	82,10	87.000,00	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	9.194.175,00	76,62	76,62	2.805.825,00	
2.17.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00	9.194.175,00	76,62	76,62	2.805.825,00	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.660.000,00	242.184.291	83,32	83,32	48.475.709,00	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.630.000,00	32.113.905,00	81,03	81,03	7.516.095,00	
2.17.01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas	25.844.000,00	22.538.905,00	87,21	87,21	3.305.095,00	
2.17.01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak,Bea dan Perizinan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor -kendaraan dinas bermotor perorangan	12.786.000,00	8.575.000,00	67,07	67,07	4.211.000,00	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.790.000,00	152.872.386,00	83,18	83,18	30.917.614,00	
2.17.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	65.000.000,00	60.250.000,00	92,69	92,69	4.750.000,00	
2.17.01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	7.500.000,00	4.279.000,00	57,05	57,05	3.221.000,00	
2.17.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor -kendaraan dinas bermotor perorangan	111.290.000,00	88.343.386,00	79,38	79,38	22.946.614,00	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.240.000,00	12.198.000,00	54,85	54,85	10.042.000,00	
2.17.01.2.09.06.5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	6.000.000,00	1.675.000,00	27,92	27,92	4.325.000,00	
2.17.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0121	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat Pendingin	4.880.000,00	2.600.000,00	53,28	53,28	2.280.000,00	
2.17.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405	Belanja pemeliharaan komputer -komputer unit-personal computer	5.840.000,00	4.170.000,00	71,40	71,40	1.670.000,00	
2.17.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer lainnya	5.520.000,00	3.753.000,00	67,99	67,99	1.767.000,00	

KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.01.2.09.10.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa tenaga kebersihan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	970.155.000	947.473.900,00	97,66	97,66	22.681.100,00	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten/Kota	286.445.000,00	271.622.000,00	94,83	94,83	14.823.000,00	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	286.445.000,00	271.622.000,00	94,83	94,83	14.823.000,00	
2.17.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	
2.17.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	
2.17.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	1.960.000,00	1.450.000,00	73,98	73,98	510.000,00	
2.17.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja makanan dan minuman rapat	8.640.000,00	5.472.000,00	63,33	63,33	3.168.000,00	
2.17.02.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa,Acara dan Panitia	21.300.000,00	21.300.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.02.2.01.01.5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website	156.000.000,00	149.500.000,00	95,83	95,83	6.500.000,00	
2.17.02.2.01.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan /Reklame,Film dan Pemotretan	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.02.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	93.900.000,00	93.900.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang ,Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	683.710.000,00	675.851.900,00	98,85	98,85	7.858.100,00	
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang,Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	683.710.000,00	675.851.900,00	98,85	98,85	197.637.018,00	
2.17.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.812.000,00	4.640.900,00	68,13	68,13	2.171.100,00	
2.17.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.830.000,00	880.000,00	48,09	48,09	950.000,00	
2.17.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.798.000,00	5.544.000,00	95,62	95,62	254.000,00	

KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
2.17.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.800.000,00	10.782.000,00	99,83	99,83	18.000,00	
2.17.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	22.500.000,00	22.455.000,00	99,80	99,80	45.000,00	
2.17.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa, Acara dan Panitia	41.400.000,00	41.400.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0025	Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan /Reklame, Film dan Pemetretan	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	99,90	50.000,00	
2.17.02.2.02.01.5.1.02.02.04.0123	Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (Home Use)	198.770.000,00	198.000.000,00	99,61	99,61	770.000,00	
2.17.02.2.02.01.5.1.02.02.04.0137	Belanja sewa alat studio lainnya	33.000.000,00	32.400.000,00	98,18	98,18	600.000,00	
2.17.02.2.02.01.5.1.02.02.05.0037	Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.02.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	136.400.000,00	136.400.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.517.948.400,00	1.425.848.941,00	93,93	93,93	92.099.459,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah/Kabupaten Kota	1.517.948.400,00	1.425.848.941,00	93,93	93,93	92.099.459,00	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan kekuatan , Kesehatan, Kemandirian , Ketangguhan , serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	198.579.000,00	195.789.000,00	98,60	98,60	2.790.000,00	
2.17.03.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	1.248.000,00	680.000,00	54,49	54,49	568.000,00	
2.17.03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.260.000,00	1.245.000,00	98,81	98,81	15.000,00	
2.17.03.2.01.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	9.271.000,00	7.764.000,00	83,75	83,75	1.507.000,00	
2.17.03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa, Acara dan Panitia	36.400.000,00	36.400.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.03.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	150.400.000,00	149.700.000,00	99,53	99,53	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.319.369.400,00	1.230.059.941,00	93,23	93,23	89.309.459,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	24.089.000,00	6.972.100,00	28,94	28,94	17.116.900,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1.763.000,00	1.736.000,00	98,47	98,47	27.000,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	12.721.000,00	1.844.000,00	14,50	14,50	10.877.000,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cenderamata	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.420.000,00	95,00	95,00	180.000,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan minuman aktivitas lapangan	9.000.000,00	8.550.000,00	95,00	95,00	450.000,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0064	Belanja pakaian dinas lapangan (PDL)	12.500.000,00	12.125.000,00	97,00	97,00	375.000,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	113.100.000,00	113.100.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0006	Honorarium penyuluhan dan pendampingan	40.800.000,00	40.800.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0026	Belanja jasa tenaga administrasi	126.000.000,00	124.500.000,00	98,81	98,81	1.500.000,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0027	Belanja jasa tenaga operator komputer	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Luran jaminan kesehatan bagi Non ASN	12.096.000,00	11.696.941,00	96,70	96,70	399.059,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Luran jaminan kecelakaan Kerja bagi Non ASN	302.400,00	285.600,00	94,44	94,44	16.800,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Luran jaminan kematian bagi Non ASN	378.000,00	357.000,00	94,44	94,44	21.000,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.04.0123	Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (Home Use)	242.650.000,00	240.890.000,00	99,27	99,27	1.760.000,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.05.0037	Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	88.000.000,00	44.463.300,00	50,53	50,53	43.536.700,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota	28.800.000,00	19.200.000,00	66,67	66,67	9.600.000,00	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	367.320.000,00	363.870.000,00	99,06	99,06	3.450.000,00	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1.129.513.200	1.104.036.744,00	97,74	97,74	25.476.456	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	1.129.513.200,00	1.104.036.744,00	97,74	97,74	25.476.456,00	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	402.736.200,00	395.739.744,00	98,26	98,26	6.996.456,00	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	3.080.000,00	2.680.000,00	87,01	87,01	400.000,00	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1.395.000,00	1.320.000,00	94,62	94,62	75.000,00	

KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	1.960.000,00	1.450.000,00	73,98	73,98	510.000,00	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0032	Belanja alat/bahan untuk Keziata Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	10.800.000,00	9.576.000,00	88,67	88,67	1.224.000,00	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan minuman aktivitas lapangan	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	39.750.000,00	39.000.000,00	98,11	98,11	750.000,00	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja jasa tenaga administrasi	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	30.000.000,00	29.800.000,00	99,33	99,33	200.000,00	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran jaminan kesehatan bagi Non ASN	10.368.000,00	10.146.744,00	97,87	97,87	221.256,00	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran jaminan kecelakaan Kerja bagi Non ASN	259.200,00	252.000,00	97,22	97,22	7.200,00	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran jaminan kematian bagi Non ASN	324.000,00	315.000,00	97,22	97,22	9.000,00	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	182.400.000,00	178.800.000,00	98,03	98,03	3.600.000,00	
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	726.777.000,00	708.297.000,00	97,46	97,46	18.480.000,00	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	5.951.000,00	0,00	0,00	0,00	5.951.000,00	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	4.806.000,00	0,00	0,00	0,00	4.806.000,00	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- Suvenir/Cendera Mata	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan minuman aktivitas lapangan	16.200.000,00	15.390.000,00	95,00	95,00	810.000,00	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.01.01.0064	Belanja pakaian dinas lapangan (PDL)	10.500.000,00	10.185.000,00	97,00	97,00	315.000,00	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa, Acara dan Panitia	49.100.000,00	49.100.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	50.000.000,00	48.850.000,00	97,70	97,70	1.150.000,00	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	199.290.000,00	198.222.000,00	99,46	99,46	1.068.000,00	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.02.05.0037	Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.04.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	141.400.000,00	141.400.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	203.564.000,00	149.868.600	73,62	73,62	53.695.400,00	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	203.564.000,00	149.868.600	73,62	73,62	53.695.400,00	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	203.564.000,00	149.868.600,00	73,62	73,62	53.695.400,00	
2.17.05.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	572.000,00	372.600,00	65,14	65,14	199.400,00	
2.17.05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1.480.000,00	1.460.000,00	98,65	98,65	20.000,00	
2.17.05.2.01.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	6.312.000,00	5.236.000,00	82,95	82,95	1.076.000,00	
2.17.05.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa, Acara dan Panitia	27.200.000,00	27.200.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.05.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	168.000.000,00	115.600.000,00	68,81	68,81	52.400.000,00	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.124.216.000,00	1.655.876.875,00	77,95	77,95	468.339.125,00	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.124.216.000,00	1.655.876.875,00	77,95	77,95	468.339.125,00	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah ,Akses Pasar, Akses Pembiayaan ,Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,Standarisasi, dan Restrukturasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.124.216.000,00	1.655.876.875,00	77,95	77,95	468.339.125,00	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	2.310.000,00	864.900,00	37,44	37,44	1.445.100,00	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1.321.000,00	1.307.000,00	98,94	98,94	14.000,00	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	15.055.000,00	10.102.000,00	67,10	67,10	4.953.000,00	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.01.01.0032	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas	35.250.000,00	34.695.000,00	98,43	98,43	555.000,00	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	22.500.000,00	9.405.000,00	41,80	41,80	13.095.000,00	
2.17.06.2.01.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan minuman aktivitas lapangan	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.06.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa, Acara dan Panitia	161.700.000,00	158.700.000,00	98,14	98,14	3.000.000,00	
2.17.06.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.02.01.0006	Honorarium penyuluhan dan pendampingan	675.000.000,00	543.000.000,00	80,44	80,44	132.000.000,00	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja jasa tenaga ahli	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.06.2.01.01.5.1.02.02.05.0030	Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya	300.000.000,00	108.900.000,00	36,30	36,30	191.100.000,00	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.02.05.0037	Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	102.000.000,00	80.547.975,00	78,97	78,97	21.452.025,00	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	711.480.000,00	708.355.000,00	99,56	99,56	3.125.000,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	5.047.816.700,00	4.397.844.630,00	87,12	87,12	649.972.070,00	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	5.047.816.700,00	4.397.844.630,00	87,12	87,12	649.972.070,00	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.821.271.000,00	2.677.694.220,00	94,91	94,91	143.576.780,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	10.060.000,00	4.658.000,00	46,30	46,30	5.402.000,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	4.201.000,00	3.022.000,00	71,94	71,94	1.179.000,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	16.414.000,00	8.086.000,00	49,26	49,26	8.328.000,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.01.01.0032	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainn	50.700.000,00	50.700.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	72.840.000,00	69.198.000,00	95,00	95,00	3.642.000,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan minuman aktivitas lapangan	77.520.000,00	77.016.000,00	99,35	99,35	504.000,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.01.01.0064	Belanja pakaian dinas lapangan (PDL)	9.500.000,00	9.405.000,00	99,00	99,00	95.000,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa,Acara dan Panitia	121.500.000,00	112.300.000,00	92,43	92,43	9.200.000,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	34.800.000,00	34.800.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0017	Belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	197.000.000,00	197.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja jasa tenaga administrasi	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0027	Belanja jasa tenaga operator komputer	579.600.000,00	579.600.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	100.000.000,00	99.400.000,00	99,40	99,40	600.000,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	15.000.000,00	14.950.000,00	99,67	99,67	50.000,00	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran jaminan kesehatan bagi Non ASN	8.640.000,00	8.455.620,00	97,87	97,87	184.380,00	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	216.000,00	201.600,00	93,33	93,33	14.400,00	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran jaminan kematian bagi Non ASN	270.000,00	252.000,00	93,33	93,33	18.000,00	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	79.200.000,00	76.000.000,00	95,96	95,96	3.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.04.0123	Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (Home Use)	623.610.000,00	614.450.000,00	98,53	98,53	9.160.000,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	117.480.000,00	117.480.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.05.0037	Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00	10.000.000,00	83,33	83,33	2.000.000,00	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	272.720.000,00	272.720.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.754.518.200,00	1.315.974.270,00	75,00	75,00	438.543.930,00	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	17.862.000,00	3.254.000,00	18,22	18,22	14.608.000,00	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	3.890.000,00	0,00	0,00	0,00	3.890.000,00	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	178.166.200,00	159.275.200,00	89,40	89,40	18.891.000,00	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa,Acara dan Panitia	198.400.000,00	138.400.000,00	69,76	69,76	60.000.000,00	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	105.000.000,00	95.130.000,00	90,60	90,60	9.870.000,00	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.02.12.0001	Belanja kursus singkat /pelatihan	669.000.000,00	462.900.000,00	#DIV/0!	69,19	206.100.000,00	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.000.000,00	5.515.070,00	#DIV/0!	68,94	2.484.930,00	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	560.200.000,00	437.500.000,00	78,10	78,10	122.700.000,00	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	259.049.000,00	221.421.640,00	85,47	80,07	37.627.360,00	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	3.447.000,00	1.964.000,00	56,98	56,98	1.483.000,00	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1.160.000,00	1.150.000,00	99,14	99,14	10.000,00	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	6.542.000,00	5.264.000,00	80,46	80,46	1.278.000,00	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa,Acara dan Panitia	47.900.000,00	38.500.000,00	80,38	80,38	9.400.000,00	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	36.000.000,00	30.543.640,00	84,84	84,84	5.456.360,00	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	140.000.000,00	130.000.000,00	92,86	92,86	10.000.000,00	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	20.000.000,00	14.000.000,00	70,00	70,00	6.000.000,00	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	150.579.000,00	147.458.400,00	97,93	97,93	3.120.600,00	
2.17.07.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	787.000,00	572.400,00	72,73	72,73	214.600,00	
2.17.07.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1.480.000,00	1.428.000,00	96,49	96,49	52.000,00	
2.17.07.2.01.04.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	6.312.000,00	5.158.000,00	81,72	81,72	1.154.000,00	

KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.07.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa,Acara dan Panitia	27.200.000,00	27.200.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	114.800.000,00	113.100.000,00	98,52	98,52	1.700.000,00	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	62.399.500,00	35.296.100	56,56	56,56	27.103.400,00	
2.17.07.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.07.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.07.2.01.05.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	5.399.500,00	4.420.000,00	81,86	81,86	979.500,00	
2.17.07.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.07.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa,Acara dan Panitia	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.07.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	57.000.000,00	30.876.100,00	54,17	54,17	26.123.900,00	
2.17.07.2.01.05.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	10.728.542.572,00	8.479.190.703,00	79,03	79,03	2.249.351.869,00	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	10.728.542.572,00	8.479.190.703,00	79,03	79,03	2.249.351.869,00	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan ,Pemasaran ,SDM, serta Desain dan Teknologi	10.728.542.572,00	8.479.190.703,00	79,03	79,03	2.249.351.869,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0001	Belanja bahan-bahan bangunan dan kontruksi	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	15.989.000,00	10.558.800,00	66,04	66,04	5.430.200,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	13.070.000,00	2.715.000,00	20,77	20,77	10.355.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	90.304.000,00	83.100.000,00	92,02	92,02	7.204.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	22.944.000,00	2.270.000,00	9,89	9,89	20.674.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0030	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	32.126.600,00	26.803.500,00	83,43	83,43	5.323.100,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik	3.258.500,00	0,00	0,00	0,00	3.258.500,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0032	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas	28.275.000,00	25.675.000,00	90,80	90,80	2.600.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor suvenir/cendera mata	414.750.000,00	392.100.000,00	94,54	94,54	22.650.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	53.598.200,00	49.368.000,00	92,11	92,11	4.230.200,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.282.000,00	1.196.000,00	93,29	93,29	86.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	391.400.000,00	217.529.000,00	55,58	55,58	173.871.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan minuman Aktivitas Lapangan	47.800.000,00	32.550.000,00	68,10	68,10	15.250.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0064	Belanja pakaian dinas lapangan (PDL)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	

KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa, Acara dan Panitia	246.800.000,00	155.500.000,00	63,01	63,01	91.300.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	337.925.000,00	246.300.000,00	72,89	72,89	91.625.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0007	Honorarium rohaniawan	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0017	Belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	391.000.000,00	362.000.000,00	92,58	92,58	29.000.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja jasa tenaga administrasi	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0027	Belanja jasa tenaga operator komputer	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0028	Belanja jasa tenaga pelayanan umum	108.000.000,00	54.000.000,00	50,00	50,00	54.000.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja jasa tenaga ahli	685.200.000,00	573.800.000,00	83,74	83,74	111.400.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	216.000.000,00	86.000.000,00	39,81	39,81	130.000.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0031	Belanja jasa tenaga keamanan	150.000.000,00	77.000.000,00	51,33	51,33	73.000.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0039	Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0041	Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja jasa penyelenggaraan acara	50.000.000,00	49.510.000,00	99,02	99,02	490.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	19.800.000,00	228.000,00	1,15	1,15	19.572.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	452.292.672,00	19.136.432,00	4,23	4,23	433.156.240,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0063	Belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran jaminan kesehatan bagi Non ASN	6.912.000,00	6.764.496,00	97,87	97,87	147.504,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	172.800,00	168.000,00	97,22	97,22	4.800,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran jaminan kematian bagi Non ASN	216.000,00	210.000,00	97,22	97,22	6.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.04.0022	Belanja sewa electric generating set	39.600.000,00	38.000.000,00	95,96	95,96	1.600.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.04.0123	Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (Home Use)	1.154.242.000,00	1.141.318.000,00	98,88	98,88	12.924.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.04.0137	Belanja sewa alat studio lainnya	290.620.000,00	289.260.000,00	99,53	99,53	1.360.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.05.0012	Belanja sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.05.0030	Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya	550.000.000,00	340.257.650,00	61,87	61,87	209.742.350,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.05.0037	Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.05.0050	Belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.09.0014	Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa khusus	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.12.0001	Belanja kursus singkat/pelatihan	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	374.000.000,00	349.589.770,00	93,47	93,47	24.410.230,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	350.000.000,00	348.800.000,00	99,66	99,66	1.200.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	560.000.000,00	339.628.055,00	60,65	60,65	220.371.945,00	

KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.07.2.01.02.5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba,sukarela bersifat sosial kemasyarakatan	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal alat angkutan darat bermotor lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.500.000.000,00	1.196.000.000,00	79,73	79,73	304.000.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perakasan Kontruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan perlengkapan kantor	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	159.226.800,00	130.000.000,00	81,64	81,64	29.226.800,00	
2.17.08.2.01.01.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.062.000.000,00	1.030.050.000,00	96,99	96,99	31.950.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.655.000,00	3.105.000,00	54,91	54,91	2.550.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	41.183.000,00	40.800.000,00	99,07	99,07	383.000,00	
2.17.08.2.01.01.5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	493.500.000,00	493.500.000,00	100,00	100,00	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal alat komunikasi telephone	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal bangunan fasilitas umum	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
2.17.08.2.01.01.5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Software	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	

Makassar, 03 Januari 2024
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA MAKASSAR

Muhammad Rheza,S.STP.M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I/ IV / b
Nip : 19800314 199912 1 002

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM
Kota Makassar

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
			UNSUBSIDIARIS															
Mewujudkan Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	100%	8.646.744.000	100%	8.971.616.000	100%	9.469.231.000	100%	10.172.072.000	100%	11.108.085.000	100%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	75%	90%		90%		90%		90%		90%		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
		2.17.01.0.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	100	327.974.000	100	362.974.000	100	362.974.000	100	391.410.000	100	391.410.000	100	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja		2 Dokumen	149.193.000	2 Dokumen	181.193.000	2 Dokumen	181.193.000	2 Dokumen	181.193.000	2 Dokumen	181.193.000	2 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Forum SKPD yang dilaksanakan		1 Kali Kegiatan		1 Kali Kegiatan		1 Kali Kegiatan		1 Kali Kegiatan		1 Kali Kegiatan		1 Kali Kegiatan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	12.564.000	1 Dokumen	12.564.000	1 Dokumen	12.564.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	15.300.000	1 Dokumen	15.300.000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	13.194.000	1 Dokumen	13.194.000	1 Dokumen	13.194.000	1 Dokumen	15.194.000	1 Dokumen	15.194.000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	15.300.000	1 Dokumen	15.300.000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD (IKU) SKPD		1 Dokumen	117.558.000	1 Dokumen	117.558.000	1 Dokumen	117.558.000	1 Dokumen	135.558.000	1 Dokumen	135.558.000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Penyusunan Laporan Perjanjian Kinerja SKPD		1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD		1 Dokumen	10.865.000	1 Dokumen	13.865.000	1 Dokumen	13.865.000	1 Dokumen	13.865.000	1 Dokumen	13.865.000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Laporan Evaluasi Renja SKPD		1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.484.582.000		6.509.432.000		7.013.032.000		7.185.357.000		7.948.768.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan		33 Orang	6.024.745.000	33 Orang	6.024.745.000	33 Orang	6.524.745.000	33 Orang	6.685.745.000	33 Orang	7.449.156.000	33 Orang	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan		12 Bulan	277.560.000	12 Bulan	273.960.000	12 Bulan	277.560.000	12 Bulan	277.560.000	12 Bulan	277.560.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi		12 Bulan	135.727.000	12 Bulan	135.727.000	12 Bulan	135.727.000	12 Bulan	146.227.000	12 Bulan	146.227.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		04	Koordinasidan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang disediakan		2 Dokumen	6.550.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun		5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	15.825.000	5 Dokumen	15.825.000	5 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		06	Pengolahan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
			07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun		2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			08 Penyusunan Anggaran Pelaporan Prognosis Realisasi				10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				101.947.000		167.000.000		167.000.000		167.000.000		225.167.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dihasilkan		4 Dokumen	101.947.000	4 Dokumen	167.000.000	4 Dokumen	167.000.000	4 Dokumen	167.000.000	4 Dokumen	225.167.000	4 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				286.890.800		403.890.800		403.890.800		403.890.800		503.989.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan		77 Pasang	46.200.000	77 Pasang	46.200.000	77 Pasang	46.200.000	77 Pasang	46.200.000	77 Pasang	46.200.000	77 Pasang	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang disusun		4 Laporan	120.690.800	4 Laporan	165.690.800	4 Laporan	165.690.800	4 Laporan	165.690.800	4 Laporan	265.789.000	4 Laporan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan		10 Orang	120.000.000	16 Orang	192.000.000	16 Orang	192.000.000	16 Orang	192.000.000	16 Orang	192.000.000	16 Orang	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				429.149.288		969.147.038		959.522.038		986.397.088		1.000.733.888		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		4 Jenis	8.298.000	4 Jenis	8.298.000	4 Jenis	8.298.000	4 Jenis	8.298.000	4 Jenis	8.298.000	4 Jenis	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Peralengkap Kantor yang tersedia		12 Bulan	108.958.788	12 Bulan	170.759.038	12 Bulan	170.759.038	12 Bulan	170.759.088	12 Bulan	185.095.888	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Alat Rumah Tangga yang disediakan		1 Unit	8.125.000	2 Unit	17.750.000	1 Unit	8.125.000	2 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia		12 Bulan	13.427.500	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		12 Bulan	52.080.000	12 Bulan	52.080.000	12 Bulan	52.080.000	12 Bulan	52.080.000	12 Bulan	52.080.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan		5 Jenis	16.260.000	5 Jenis	16.260.000	5 Jenis	16.260.000	5 Jenis	16.260.000	5 Jenis	16.260.000	5 Jenis	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan		22 Kali	222.000.000	66 Kali	674.000.000	66 Kali	674.000.000	66 Kali	674.000.000	66 Kali	674.000.000	66 Kali	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				526.075.000		30.886.250		34.232.500		445.735.000		445.735.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Mobil Dinas Jabatan		1 Unit	453.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia		15 Unit	73.075.000	4 Unit	30.886.250	4 Unit	34.232.500	1 Unit	445.735.000	2 Unit	445.735.000	2 Unit	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.01.2.07		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				125.403.812		152.403.812		152.697.562		202.400.012		202.400.012		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Administrasi Surat Menyurat		12 Bulan	123.003.800	12 Bulan	150.003.800	12 Bulan	150.297.550	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan		1 Jenis	2.400.012	1 Jenis	2.400.012	1 Jenis	2.400.012	1 Jenis	2.400.012	1 Jenis	2.400.012	1 Jenis	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				364.722.100		375.882.100		375.882.100		389.882.100		389.882.100		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		1 Unit	39.758.000	1 Unit	39.758.000	1 Unit	39.758.000	1 Unit	39.758.000	1 Unit	39.758.000	1 Unit	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
			02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional yang tersedia		13 Unit	240.084.100	13 Unit	240.084.100	13 Unit	240.084.100	13 Unit	240.084.100	13 Unit	240.084.100	13 Unit	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan		49 Unit	39.880.000	65 Unit	51.040.000	65 Unit	51.040.000	65 Unit	65.040.000	65 Unit	65.040.000	65 Unit	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			10 Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Jasa Kebersihan yang tersedia		5 Orang	45.000.000	5 Orang	45.000.000	5 Orang	45.000.000	5 Orang	45.000.000	5 Orang	45.000.000	5 Orang	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
Memberikan Kemudahan Untuk Memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi	Meningkatnya Lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Bpr/Lkm Aktif	41,37%	44,82%	435.853.000	48,27%	483.356.000	58,62%	510.165.000	65,51%	548.032.000	72,41%	598.461.000	72,41%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas bagi koperasi		200 Koperasi	147.894.000	464 Koperasi	328.762.000		339.872.000		360.983.000		394.568.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi		100 Koperasi	147.894.000	230 Koperasi	328.762.000	200 Koperasi	339.872.000	200 Koperasi	360.983.000	266 Koperasi	394.568.000	266 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Sosialisasi Pedoman Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi		100 Koperasi		234 Koperasi		200 Koperasi	200 Koperasi	300 Koperasi		300 Koperasi		300 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam		400 Koperasi	287.959.000	220 Koperasi	154.594.000		170.293.000		187.049.000		203.893.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP		200 Koperasi	287.959.000	110 Koperasi	154.594.000	120 Koperasi	170.293.000	135 Koperasi	187.049.000	150 Koperasi	203.893.000	150 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Sosialisasi Pedoman Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP		200 Koperasi		110 Koperasi		120 Koperasi		135 Koperasi		150 Koperasi		150 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.03	PROGRAM PENGWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa	73%	11,18%	1.127.327.800	13,05%	1.169.683.000	13,95%	1.234.560.000	15,20%	1.326.194.000	16,27%	1.448.228.000	16,27%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa		1.260 Koperasi	1.127.327.800	1.333 Koperasi	1.169.683.000		1.234.560.000		1.326.194.000		1.448.228.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Manajemen Pengolahan dan Peningkatan Kualitas Pengawas Kelembagaan Koperasi		100 Koperasi	295.801.500	110 Koperasi	316.979.200	125 Koperasi	349.417.700	110 Koperasi	395.234.700	200 Koperasi	457.151.700	200 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Pengawasan Akuntabilitas Koperasi		100 Koperasi		110 Koperasi		125 Koperasi		110 Koperasi		110 Koperasi		110 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
				Jumlah Peserta Pengawasan Simpan Pinjam dalam Penerapan Undang - Undang Perkoperasian		100 Koperasi		108 Koperasi		125 Koperasi		109 Koperasi		104 Koperasi	104 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Peserta Peningkatan Manajemen Pengawasan Manajemen Pengawasan bagi Pengawas Koperasi		100 Koperasi		110 Koperasi		125 Koperasi		220 Koperasi		200 Koperasi	200 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
		02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang - Undanga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Pelaporan Keuangan Koperasi dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (DAK)		160 Koperasi	831.526.300	160 Koperasi	852.703.800	160 Koperasi	885.142.300	160 Koperasi	930.959.300	160 Koperasi	991.076.300	160 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Penilaian Koperasi Berprestasi dan Pemberian Penghargaan		500 Koperasi		500 Koperasi		500 Koperasi		500 Koperasi		500 Koperasi	500 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Peserta Penyusunan Laporan RAT bagi Koperasi		100 Koperasi		120 Koperasi		150 Koperasi		220 Koperasi		228 Koperasi	228 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Peserta Revitalisasi Koperasi		100 Koperasi		115 Koperasi		138 Koperasi		126 Koperasi		200 Koperasi	200 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
Memberikan Kemudahan Untuk Memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi	Meningkatnya Kemampuan Pengetahuan dan Profesionalisme SDM Koperasi dan UMKM	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOOPERASI	Persentase KSP/USP yang Sehat	59,60%	61,58%	675.056.800	64,23%	700.420.000	67,54%	739.269.000	72,84%	794.140.000	76,15%	867.215.000	76,15%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang telah melakukan penilaian kesehatan koperasi		1.090 Koperasi	675.056.800	770 Koperasi	700.420.000		739.269.000		794.140.000		867.215.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Penilaian Kesehatan Koperasi		375 Koperasi	431.469.800	300 Koperasi	443.008.400	300 Koperasi	467.682.000	300 Koperasi	505.753.000	339 Koperasi	562.055.000	339 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
	Jumlah Peserta Pelatihan Kesehatan dalam Upaya Peningkatan Kinerja Manajemen KSP/USP				375 Koperasi	100 Koperasi		138 Koperasi		180 Koperasi		240 Koperasi		240 Koperasi		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
	Jumlah Monitoring Keragaan KSP/USP				12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
		02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Predikat terhadap Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP/USP		240 Koperasi	243.587.000	250 Koperasi	257.411.600	260 Koperasi	271.587.000	280 Koperasi	288.387.000	240 Koperasi	305.160.000	240 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
	Jumlah Peserta Penghargaan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi Pelaku KSP/USP				100 Koperasi	120 Koperasi		130 Koperasi		140 Koperasi		100 Koperasi		100 Koperasi		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
Memberikan Kesempatan Usaha Seluas - Luasnya kepada Koperasi untuk Meningkatkan dan Memantapkan Kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang Berkualitas, Tangguh dan Mandiri	Meningkatnya Kemampuan Pengetahuan dan Profesionalisme SDM Koperasi dan UMKM	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	0,30%	1,14%	577.340.000	1,62%	599.032.000	1,79%	632.257.000	1,95%	679.186.000	2,13%	741.683.000	2,13%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan pelatihan		800 Koperasi	577.340.000		599.032.000		632.257.000		679.186.000		741.683.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM koperasi	Jumlah Peserta Digitalisasi Koperasi dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Kelas Dunia yang Efisien dan Terpercaya		400 Koperasi	577.340.000		599.032.000	-	632.257.000	-	679.186.000	525 Koperasi	741.683.000	525 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Optimalisasi Peran Koperasi dalam Mendorong Peningkatan Perekonomian di Lorong - Lorong Kota Makassar		-				-				-	-	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Peserta Penerapan Manajemen Koperasi Berbasis Syariah di Lorong - Lorong Kota Makassar		400 Koperasi				-				500 Koperasi	500 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Peserta Peningkatan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Berbasis Akrual		-		420 Koperasi		-					-	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Peserta Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan bagi Koperasi		-		420 Koperasi		-		400 Koperasi			-	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Peserta Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Laporan Keuangan Koperasi (Akuntansi Komputerisasi dan Auditing/Fraud)		-				460 Koperasi					-	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kualitas Pelayanan bagi Koperasi		-				440 Koperasi					-	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
				Jumlah Peserta Peningkatan Teknik Manajemen Perkoperasian								550 Koperasi				Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	13,41%	18,78%	1.320.066.700	25,13%	1.369.664.000	26,83%	1.445.633.000	28,17%	1.552.933.000	30,41%	1.695.831.000	30,41%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.000 Koperasi	1.320.066.700	1.126 Koperasi	1.369.664.000		1.445.633.000		1.552.933.000		1.695.831.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop)		300 Koperasi	1.320.066.700	300 Koperasi	1.369.664.000	360 Koperasi	1.445.633.000	330 Koperasi	1.552.933.000	420 Koperasi	1.695.831.000	420 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Penerapan Teknologi Modern dalam Manajemen Usaha Koperasi		100 Koperasi		200 Koperasi		200 Koperasi		204 Koperasi		202 Koperasi		202 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Peningkatan dan Pengembangan Enterpreneurship Koperasi		100 Koperasi		100 Koperasi		200 Koperasi		200 Koperasi		300 Koperasi		300 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi		100 Koperasi		100 Koperasi		100 Koperasi		200 Koperasi		200 Koperasi		200 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Peningkatan dan Peran Kelompok Strategis dalam Membangun Perkoperasian		200 Koperasi		226 Koperasi		236 Koperasi		300 Koperasi		315 Koperasi		315 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi		100 Koperasi		100 Koperasi		100 Koperasi		101 Koperasi		100 Koperasi		100 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		100 Koperasi		100 Koperasi		100 Koperasi		100 Koperasi		100 Koperasi		100 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
Menumbuhkan dan Meningkatkan Kemampuan Usaha Kecil	Meningkatnya		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA	Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	89,02%	89,99%		89,99%		90,98%		91,99%		91,99%		91,99%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah	UKM yang berkualitas	2.17.07	MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor UMKM	0	750 UMKM	3.375.470.926	750 UMKM	3.502.293.000	750 UMKM	3.696.549.000	750 UMKM	3.970.921.000	750 UMKM	4.336.317.000	3750 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Wirausaha		3.375.470.926	3.502.293.000	3.696.549.000	3.970.921.000	4.336.317.000							Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM Baru yang Terdata		150 UMKM	45.886.000	150 UMKM	45.886.074	150 UMKM	45.886.074	150 UMKM	45.886.074	150 UMKM	45.886.074	150 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mengikuti kegiatan Pelatihan Pembuatan Abon	40 UMKM	1.285.168.250	-	1.411.990.250	-	1.411.990.250	150 UMKM	1.686.362.250	150 UMKM	2.051.758.250	150 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah UMKM yang mengikuti kegiatan Pelatihan Tata Rias	100 UMKM		140 UMKM	140 UMKM	150 UMKM	150 U'MKM	150 U'MKM	150 U'MKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR				
				Jumlah UMKM yang mengikuti kegiatan Pembuatan Baju Tradisional (Baju Bodo)	64 UMKM		64 UMKM	64 UMKM	64 UMKM	64 UMKM	64 UMKM	64 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR				
				Jumlah UMKM yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kreativitas Merajut	64 UMKM		64 UMKM	64 UMKM	64 UMKM	64 UMKM	64 UMKM	64 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR				
				Jumlah UMKM yang mengikuti kegiatan Pengolahan Makanan (Roti)	80 UMKM		140 UMKM	140 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR				
				Jumlah UMKM yang mengikuti Teknik Menyulam	64 UMKM		64 UMKM	64 UMKM	64 UMKM	64 UMKM	64 UMKM	64 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR				

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Koordinasi Program Enterpreneur dan Kewirausahaan		200 UMKM	296.131.000	200 UMKM	296.131.000	200 UMKM	490.387.000	200 UMKM	490.387.000	200 UMKM	490.387.000	200 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Produk		200 UMKM		200 UMKM		-		-		-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Pelatihan Pajak bagi UMKM		-		-		496 UMKM		496 UMKM		496 UMKM		496 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
Meningkatnya peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor serta peningkatan dan pemerataan pendapatan	Meningkatnya UKM yang berkualitas	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	75%	79%	1.211.719.000	79%	1.257.245.000	81%	1.326.979.000	81%	1.425.472.000	82%	1.556.641.000	82%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Wirausaha Baru (Start-up)	0	10 UMKM	1.211.719.000	10 UMKM	1.257.245.000	10 UMKM	1.326.979.000	10 UMKM	1.425.472.000	10 UMKM	1.556.641.000	50 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha yang berkembang menjadi usaha kecil			1.211.719.000		1.257.245.000		1.326.979.000		1.425.472.000		1.556.641.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kkecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknik	Jumlah Peserta Pelatihan Opatimalisasi Digital Marketing bagi UMKM (DAK)		180 UMKM		180 UMKM		180 UMKM		180 UMKM		180 UMKM		180 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Penerapan E-Commerce dalam Perluasan Pasar Produk UMKM (UMKM GO Online)		400 UMKM		-		460 UMKM							Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
				Jumlah Peserta Pengembangan Potensi Pemuda dan Wanita di Lorong - Lorong menjadi Wirausaha Baru yang Berdaya Saing		400 UMKM		420 UMKM									Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Peningkatan Kualitas Produk UMKM Siap Ekspor bagi UMKM di Lorong - Lorong Kota Makassar		400 UMKM		420 UMKM									Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Penerapan Sistem Pengelola Keuangan Digital bagi UMKM di Lorong - Lorong Kota Makassar		-		420 UMKM									Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Peningkatan Teknis Design Kemasan bagi Wirausaha Baru dan Pemula		-	1.211.719.000	-	1.257.245.000	460 UMKM	1.326.979.000	460 UMKM	1.425.472.000	625 UMKM	1.556.641.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Peningkatan Keterampilan Berwirausaha bagi Anak Putus Sekolah di Lorong - Lorong Kota Makassar		-		-		460 UMKM			625 UMKM		625 UMKM		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Peningkatan Inovasi Berbasis Teknologi dalam Mengembangkan Potensi Usaha Mikro		-		-		-		480 UMKM	500 UMKM		500 UMKM		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Peningkatan Teknik Pemasaran bagi UMKM (Strategi Branding, Promosi, dan Perluasan Pasar Berbasis Sustainability)		-		-		-		600 UMKM					Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Peningkatan Teknik Pengelolaan Pemodalan bagi Wirausaha Baru		-		-		-		-	625 UMKM		625 UMKM		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Updating Database Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Produktivitas bagi Usaha Mikro		150 Usaha Mikro		150 Usaha Mikro		150 Usaha Mikro		150 Usaha Mikro		150 Usaha Mikro		150 Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
JUMLAH						17.369.578.226		18.053.309.000		19.054.643.000		20.468.950.000		22.352.461.000				



WALIKOTA MAKASSAR

Makassar, 14 Desember 2021

Kepada
Yth. Kepala SKPD Lingkup
Pemerintah Kota Makassar
di -
M a k a s s a r

SURAT EDARAN

Nomor: 050.13/ ~~663~~ /Bappeda/XII/2021

T E N T A N G

Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (IKU-SKPD)
Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022-2026

Sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk segera menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Pemerintah Daerah (IKU-SKPD) Tahun 2022-2026 yang mengacu kepada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2021-2026;
2. IKU SKPD meliputi Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra SKPD;
3. IKU SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan Format Keputusan dan Format Lampiran IKU sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini;
4. IKU SKPD harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu atau tanggal 20 Desember 2021, setelah penetapan Peraturan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar tahun 2022-2026;
5. IKU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) merupakan acuan yang digunakan oleh SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah untuk:
 - a. Menetapkan perencanaan tahunan;
 - b. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - c. Melakukan pengukuran kinerja dan menyusun laporan kinerja;
 - d. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja.
6. Kepala SKPD Pemerintah Kota Makassar melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan IKU SKPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan IKU SKPD kepada Bappeda Kota Makassar;
7. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan IKU Pemerintah Daerah dan IKU SKPD dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan;
8. Hal-hal yang bersifat teknis lainnya terkait penetapan IKU-SKPD, dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui masing-masing mitra kerja Bidang di Bappeda Kota Makassar;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya,



WALIKOTA MAKASSAR

Moh. Ramdhan Pomanto
MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (IKU-SKPD) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR TAHUN 2022-2026

**FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (IKU-SKPD) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN KEPALA (.....Nama SKPD.....) KOTA MAKASSAR
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (.....Nama SKPD.....)
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala (.....Nama SKPD.....) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (.....Nama SKPD.....) Kota Makassar Tahun 2022-2026;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
 2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
 3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55)
 4. Dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (.....Nama SKPD.....) KOTA MAKASSAR
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN (.....Nama SKPD.....) KOTA MAKASSAR TAHUN
2022-2026;

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (.....Nama SKPD.....) Kota Makassar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh (.....Nama SKPD.....) Kota Makassar, dalam menetapkan perencanaan tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, menyusun laporan kinerja dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (.....Nama SKPD.....) Kota Makassar Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Makassar dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala (.....Nama SKPD.....) Kota Makassar Tahun 2022-2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

KEPALA (.....Nama SKPD.....)

ttd

(Nama Lengkap) _____

Pangkat:

Nip :

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(IKU-SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (.....Nama SKPD.....)
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026

No	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Sumber Data	Keterangan/Rumus Perhitungan
1				
2				
3				

KEPALA (.....Nama SKPD.....),

ttd

(Nama Lengkap)

Pangkat :

Nip :



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jalan Jenderal Achmad Yani No.02 Makassar 90111 Telp. (0411) 361 4342

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NOMOR : 518/126/Kep/DKUK/VI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan menjamin kelancaran, efektifitas dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, perlu membentuk tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, terdiri dari :
a. Tim Pengarah; dan
b. Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertugas sebagai berikut :
a. Tim Pengarah, bertugas:
1. memberikan arahan dalam penyusunan perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja;
2. memastikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak kepada masyarakat; dan
3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

- b. Tim Pelaksana, bertugas:
1. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 20 Juni 2023

KEPALA DINAS,

Muhammad Rheza, S.STP.M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I/IVb

Nip 19800314 199912 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Walikota Makassar;
2. Kepala Bappeda Kota Makassar;
3. Kepala Inspektorat Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH TAHUN 2023

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2023

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3. Sekretaris : Moh. Roy Hartono, S.STP
4. Anggota :
 - Kepala Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam
 - Kepala Bidang Pendidikan dan penyuluhan Koperasi dan UKM
 - Kepala Bidang Kelembagaan dan Koperasi
 - Kepala Bidang UKM

B. Tim Pelaksana

Kelompok Kerja :

1. Pokja 1. Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja

- a) Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Anggota :
 - Muh. Nasruddin, SE.MM
 - Dahliah
 - Amiruddin, SE
 - Hendra Wijaya, SE

Pokja 2. Pengukuran dan Capaian Kinerja

- a) Koordinator : Kepala Sub. Bagian Keuangan
- b) Anggota :
 - Nur Asia
 - St. Ramlah
 - Suwada

2. Pokja 3. Pembinaan dan Penyusunan SAKIP

- a) Koordinator : Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- b) Anggota :
 - Soraya Nurjannah Natsir, S.STP
 - Muhyiddin Ansar, SE
 - Muhammad Ilham, SE

3. Pokja 4. Evaluator Kinerja Perangkat Daerah dan Reviu SAKIP

- a) Koordinator : H. Abdul Syahid Samad, ST. M.Si
b) Anggota : - Juli Sumbung, SE
- Masdi Sampurno, SH
- Oktovina Thana, S.Sos

KEPALA DINAS,

Muhammad Rheza, S.STP.M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I/ IVb
Nip 19800314 199912 1 002

,